



**PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA, DAN PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP PENYALURAN
KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
DI INDONESIA**

*The Effect of Inflation, Interest Rate, and Gross Regional Domestic Product on
Credit Distribution at Rural Banks in Indonesia*

SKRIPSI

Oleh

**Khusnul Khotimah
NIM 150910202001**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA, DAN PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP PENYALURAN
KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
DI INDONESIA**

*The Effect of Inflation, Interest Rate, and Gross Regional Domestic Product on
Credit Distribution at Rural Banks in Indonesia*

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mendapatkan gelar Strata 1 (S1)
Ilmu Administrasi Bisnis

Oleh

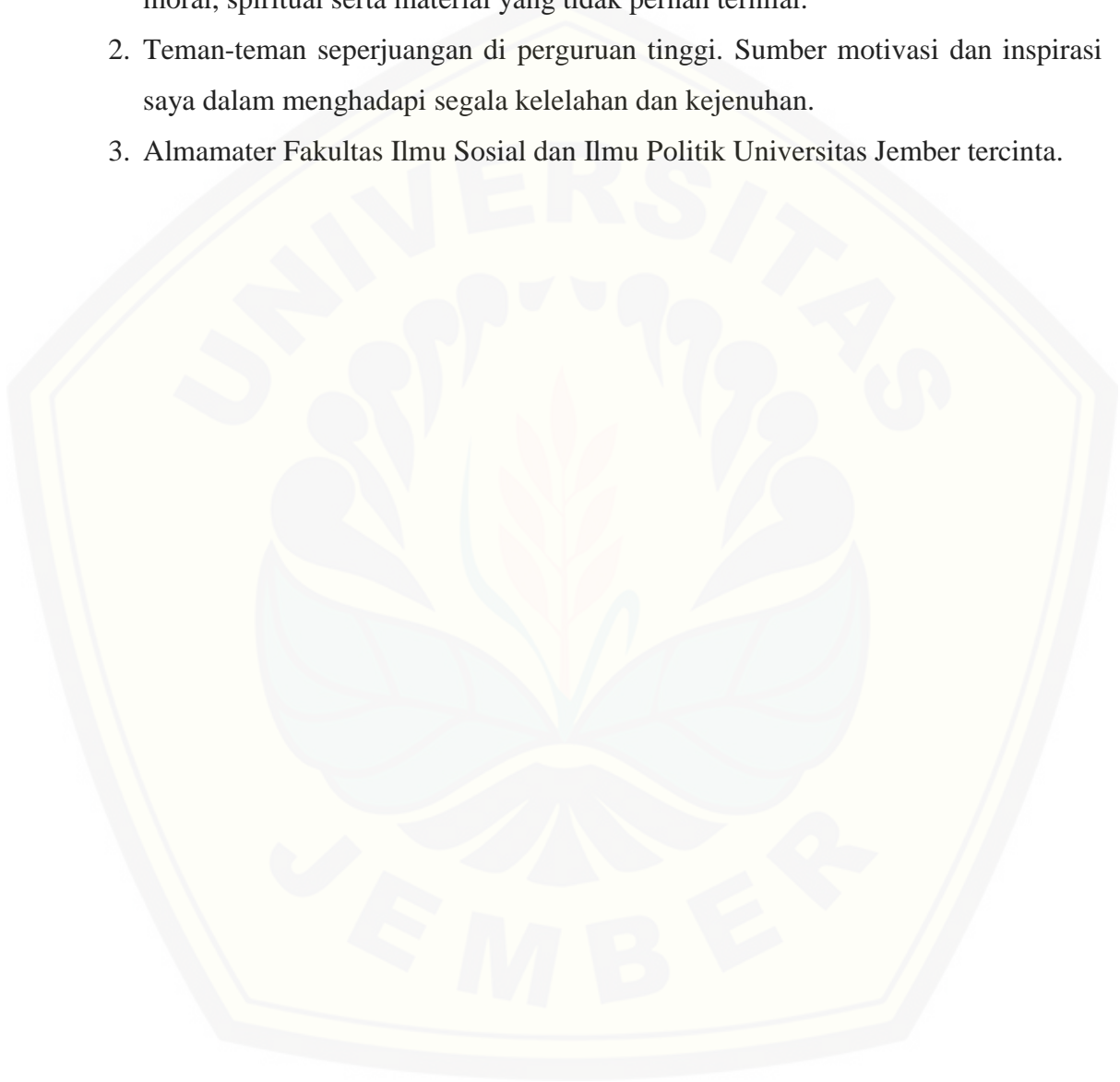
Khusnul Khotimah
NIM 150910202001

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu saya yang telah memberikan cinta, kasih sayang serta dukungan moral, spiritual serta material yang tidak pernah ternilai.
2. Teman-teman seperjuangan di perguruan tinggi. Sumber motivasi dan inspirasi saya dalam menghadapi segala kelelahan dan kejenuhan.
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember tercinta.



MOTO

Jika sebuah tali itu sudah sangat mengencang, itu tandanya akan putus.

Jika malam sudah gelap gulita, itu tandanya bahwa kegelapan akan segera lenyap.

Jika sebuah masalah itu sudah sangat menghimpit,

itu tandanya akan ada jalan keluar.

Jalan menuju kebahagiaan itu tersembunyi di balik kesucian pengetahuan dan kejernihan wawasanmu.*



* Alqarni, A. 2016. *La Tahzan: Jangan Bersedih !*. Jakarta: Qisthi Press

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusnul Khotimah

NIM : 150910202001

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 April 2019
Yang menyatakan,

Khusnul Khotimah
NIM 150910202001

SKRIPSI

**PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA, DAN PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO TERHADAP PENYALURAN KREDIT PADA BANK
PERKREDITAN RAKYAT DI INDONESIA**

Oleh

Khusnul Khotimah
NIM 150910202001

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Akhmad Toha, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Aryo Prakoso, S.E., M.SA., Ak

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia” karya Khusnul Khotimah telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari, tanggal : Rabu, 20 Februari 2019
tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
jam : 09.00 WIB

Tim Penguji:
Ketua,

Dr. Hari Karyadi, S.E., M.SA., Ak
NIP. 197202111999031003

Pembimbing I,

Penguji Anggota I,

Dr. Akhmad Toha, M.Si
NIP. 195712271987021002

Yeni Puspita SE., M.E
NIP. 198301012014042001

Mengesahkan,
Dekan

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia; Khusnul Khotimah; 150910202001; 2019; 100 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Kegiatan perekonomian yang semakin berkembang mengindikasikan bahwa kegiatan usaha masyarakat mengalami peningkatan. Jika hal ini terus berlangsung dalam waktu yang cukup lama maka perekonomian di Indonesia akan bergerak ke arah yang lebih baik. Selain itu, dengan semakin beragamnya kebutuhan akan mendorong masyarakat untuk mendapatkan uang lebih banyak. Salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan akan uang dapat dilakukan melalui pinjaman kredit pada lembaga pembiayaan seperti perbankan. Hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan fungsi perbankan yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat ke masyarakat.

Berkaitan dengan penyaluran kredit BPR, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa indikator yang mempengaruhi antara lain inflasi, suku bunga, dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 1.643 BPR, sedangkan sampel yang diperoleh sebanyak 33 BPR. Tahapan yang dilakukan meliputi pengumpulan data sekunder, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, koefisien determinasi dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit, sebaliknya variabel suku bunga dan PDRB berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Didik Eko Julianto, M.AB., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Dr. Akhmad Toha, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama, Aryo Prakoso, S.E., M.SA., Ak., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
5. Drs. Sutrisno, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Segenap dosen dan seluruh staf akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang juga ikut berperan selama masa studi hingga diselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 04 April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Bagi Akademisi	9
1.4.3 Manfaat Praktis.....	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Manajemen Keuangan	10
2.1.2 Manajemen Kredit dan Manajemen Likuiditas	12
2.2 Kredit	14
2.2.1 Tujuan Kredit	14

2.2.2 Fungsi Kredit	14
2.2.3 Prinsip Kredit	15
2.3 Inflasi	18
2.3.1 Komponen Inflasi	18
2.3.2 Macam-Macam Inflasi	19
2.4 Suku Bunga	20
2.4.1 Macam-Macam Suku Bunga	20
2.4.2 Perubahan Suku Bunga	21
2.4.3 Suku Bunga SBI.....	21
2.5 PDRB	22
2.5.1 Fungsi PDRB	22
2.5.2 Komponen PDRB	23
2.5.3 Jenis PDRB	24
2.6 Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank	24
2.6.1 Bank Umum	25
2.6.2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	26
2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu	29
2.8 Hubungan Antar Variabel	35
2.8.1 Hubungan Inflasi dengan Penyaluran Kredit.....	35
2.8.2 Hubungan Suku Bunga dengan Penyaluran Kredit	35
2.8.3 Hubungan PDRB dengan Penyaluran Kredit.....	36
2.9 Kerangka Konseptual	36
2.10 Hipotesis	38
BAB 3. METODE PENELITIAN	39
3.1 Rancangan Penelitian	39
3.2 Populasi dan Sampel	39
3.2.1 Populasi.....	39
3.3.2 Sampel	40
3.3 Jenis dan Sumber Data	41
3.4 Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukurannya	41
3.4.1 Penyaluran Kredit	42

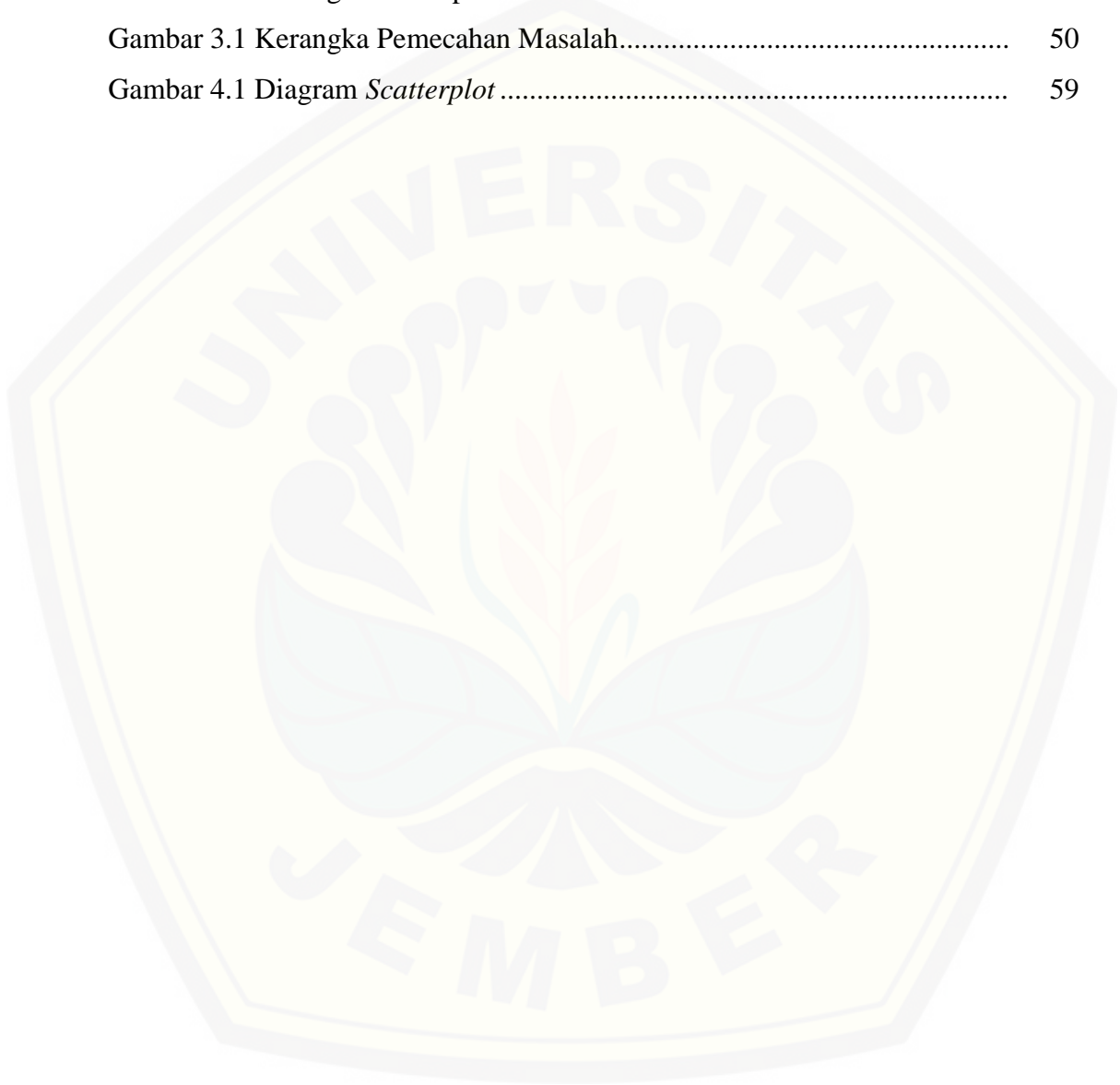
3.4.2 Inflasi	42
3.4.3 Suku Bunga.....	42
3.4.4 PDRB	43
3.5 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis	43
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	44
3.5.2 Analisis Statistik Inferensial.....	44
3.6 Kerangka Pemecahan Masalah	50
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	53
4.2 Analisis Data.....	55
4.2.1 Inflasi	55
4.2.2 Suku Bunga.....	56
4.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	56
4.2.4 Penyaluran Kredit	57
4.3 Hasil Penelitian	58
4.3.1 Uji Asumsi Klasik.....	58
4.3.2 Analisis Regresi Linier Berganda	61
4.3.3 Uji Statistik	62
4.3.4 Koefisien Determinasi (R^2).....	64
4.4 Pembahasan.....	64
4.4.1 Pengaruh Inflasi terhadap Penyaluran Kredit	64
4.4.2 Pengaruh Suku Bunga terhadap Penyaluran Kredit	66
4.4.3 Pengaruh PDRB terhadap Penyaluran Kredit.....	67
4.4.4 Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, PDRB terhadap Penyaluran Kredit.....	68
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Perbankan di Indonesia.....	1
Tabel 1.2 Jumlah Kredit dan Komposisi Penggunaan Kredit	3
Tabel 1.3 Pergerakan Inflasi di Indonesia	5
Tabel 1.4 Pergerakan BI <i>Rate</i> di Indonesia.....	6
Tabel 2.1 Tolok Ukur Tingkat Kesehatan Bank.....	28
Tabel 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1 Penentuan Sampel Penelitian	40
Tabel 4.1 Daftar Bank Perkreditan Rakyat	53
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif data Inflasi tahun 2014-2017	55
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif data SBI tahun 2014-2017	56
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif data PDRB tahun 2014-2017	56
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif data Penyaluran Kredit 2014-2017	57
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas.....	58
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	59
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi.....	60
Tabel 4.9 Hasil Regresi Linier Berganda	61
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik t.....	62
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik F	63
Tabel 4.12 Hasil Koefisien Determinasi	64

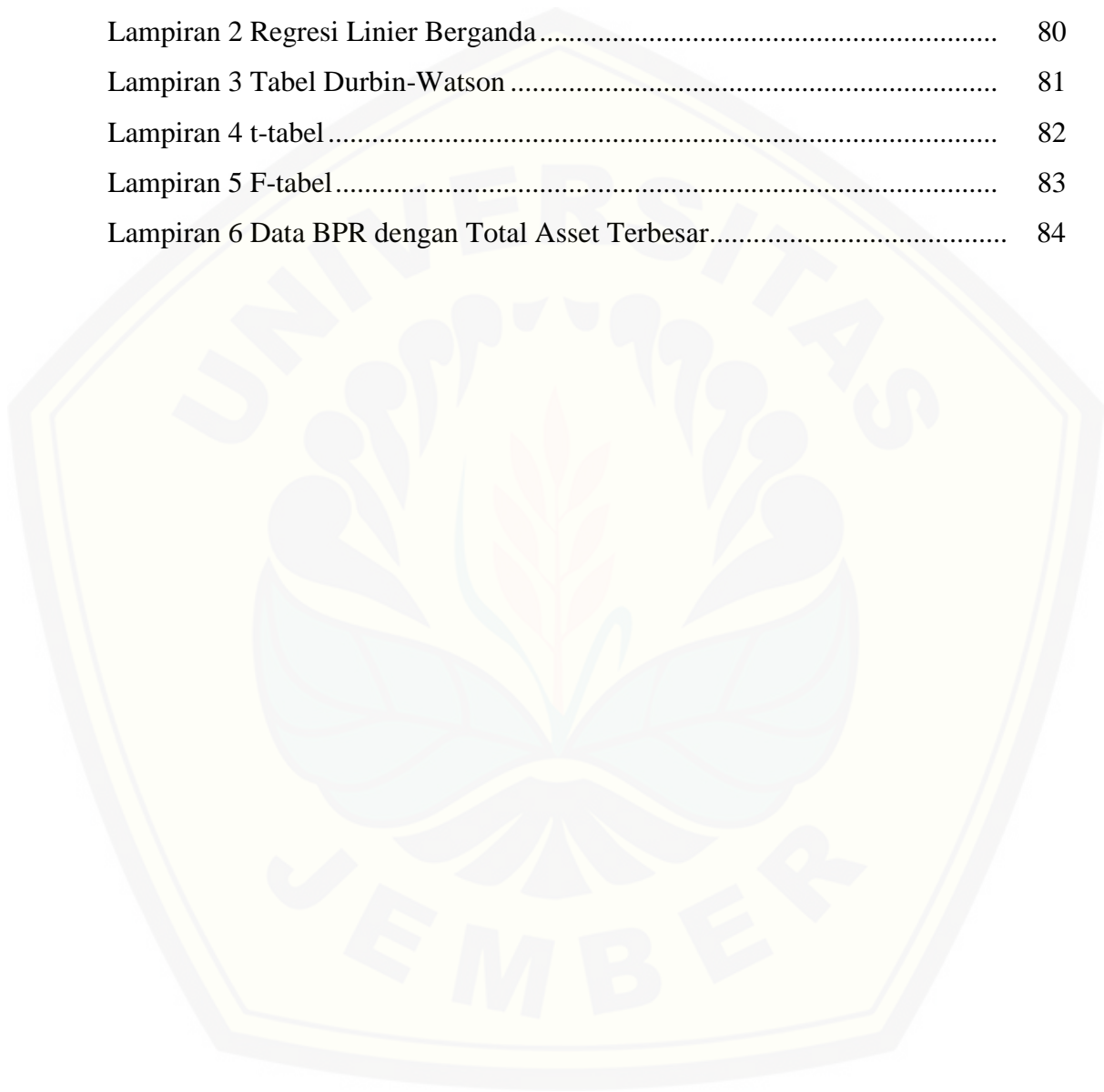
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Total Nilai PDRB Beberapa Kota di Indonesia	7
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	38
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	50
Gambar 4.1 Diagram <i>Scatterplot</i>	59



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data Penelitian.....	76
Lampiran 2 Regresi Linier Berganda.....	80
Lampiran 3 Tabel Durbin-Watson	81
Lampiran 4 t-tabel.....	82
Lampiran 5 F-tabel.....	83
Lampiran 6 Data BPR dengan Total Asset Terbesar.....	84



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia dapat diamati melalui pelaksanaan program pembangunan nasional, diantaranya pemerataan pembangunan dan hasil akhirnya, tinggi pertumbuhan ekonomi serta stabilitas ekonomi nasional. Perkembangan untuk menilai tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat diketahui dari kesejahteraan masyarakat dalam mencapai dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti pemenuhan sandang, pangan dan papan, kesehatan, pendidikan termasuk kebutuhan akan barang-barang mewah. Proses pembangunan nasional tentu diharapkan terjadinya suatu pertumbuhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sarana dan prasarana, terutama dukungan dana seperti tambahan modal untuk usaha.

Sari dan Akbar (2016) mengatakan bahwa peranan perbankan dalam pertumbuhan ekonomi sangat penting karena perbankan berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat ke masyarakat, penunjang pelaksanaan pembangunan, pemacu pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Peran perbankan inilah sangat diperlukan dalam membantu agar alokasi dana serta perputaran uang dapat bergerak lancar. Perbankan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perkembangan jumlah perbankan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Perbankan di Indonesia

Tahun	Jumlah Perbankan (unit)	
	Bank Umum	BPR
2014	119	1.643
2015	118	1.637
2016	116	1.633
2017	115	1.621

Sumber: www.bi.go.id, data diolah 2019.

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa jumlah perbankan di Indonesia didominasi oleh BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Perbandingan antara jumlah bank umum dan BPR ini sangat jauh hingga mencapai ribuan unit. Tahun 2014 jumlah bank umum sebanyak 119 unit dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2017 jumlahnya sebanyak 115. Jumlah BPR di tahun 2014 mencapai 1.643 unit, meskipun juga jumlahnya berfluktuasi setiap tahun namun masih berkisar di 1.621 unit pada tahun 2017. Jika dilihat dari perbandingan antara jumlah bank umum dan BPR dalam tabel tersebut, maka dapat diketahui bahwa BPR memiliki jumlah yang lebih banyak. Hal ini mengindikasikan bahwa BPR memberikan sumbangan lebih besar atas perputaran uang dalam memberikan penyaluran kredit untuk modal bisnis atau investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Masyarakat pada umumnya membutuhkan bank yang dapat melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang relatif mudah. Disinilah salah satu dari lembaga perbankan yaitu BPR yang memberikan kemudahan syarat administrasi dan pencairan dana lebih cepat. Yoga dan Yuliarmi (2013) menjelaskan bahwa BPR mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dari segi lokasi yang dapat mudah dijangkau, prosedur yang lebih sederhana, serta lebih mengutamakan pendekatan personal dan kemudahan dalam model pinjaman. BPR menjadi salah satu alternatif pilihan yang mampu menunjang kegiatan usaha di masyarakat. Dengan memberikan penyaluran kredit kepada masyarakat maka BPR berfungsi sebagai lembaga pembiayaan yang mampu membangun dan mengembangkan potensi juga kemampuan ekonomi masyarakat pada umumnya serta untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

Prawiroardjo (1995) menjelaskan bahwa BPR merupakan lembaga keuangan bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat berupa pinjaman kredit. Esti dan Wulandari (2012) menjelaskan bahwa penyaluran kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan yang optimal serta menjaga keamanan atas dana yang dipercayakan nasabah penyimpan di bank. Kholisudin (2012) menjelaskan bahwa pada dasarnya kredit berdasarkan jenis penggunaan terdiri atas kredit modal kerja, investasi dan

konsumsi. Penggunaan kredit umumnya masih didominasi oleh kredit modal kerja dan investasi, mengingat kredit modal kerja cukup efektif untuk penyerapan tenaga kerja. Pendapat lain diungkapkan oleh Kasmir (2012) yang menyatakan bahwa tujuan utama penyaluran kredit oleh lembaga pembiayaan adalah untuk mencari keuntungan, membantu usaha nasabah dan membantu pemerintah. Selain itu penyaluran kredit juga memiliki fungsi untuk meningkatkan daya guna uang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, sebagai alat stabilitas ekonomi, serta meningkatkan kegairahan berusaha. Komposisi kredit yang disalurkan berdasarkan jenis penggunaan kredit di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jumlah Kredit dan Komposisi Penggunaan Kredit

Tahun	Jenis Penggunaan Kredit (miliar rupiah)			Total
	Investasi	Modal Kerja	Konsumsi	
2014	903.194	1.757.449	1.013.666	3.674.309
2015	1.035.888	1.916.256	1.105.759	4.057.903
2016	1.125.467	2.049.098	1.202.630	4.377.195
2017	1.135.253	2.132.175	1.292.737	4.560.165
Total	4.199.805	7.854.978	4.614.792	

Sumber: www.bi.go.id, data diolah 2019.

Tabel 1.2 mengungkapkan bahwa selama kurun waktu empat tahun terakhir yaitu 2014-2017 total kredit yang disalurkan berdasarkan jenis penggunaan kredit terus mengalami kenaikan. Tahun 2014 total kredit yang dapat disalurkan sebesar Rp 3.674.309 miliar rupiah, di tahun 2015 naik sebesar Rp 4.057.903 miliar rupiah. Pada tahun 2016 juga mengalami kenaikan sebesar Rp 4.377.195 miliar rupiah dan terus meningkat hingga tahun 2017 sebesar Rp 4.560.165 miliar rupiah. Ditunjukkan pada tabel tersebut bahwa komposisi kredit meliputi investasi, modal kerja dan konsumsi. Penggunaan kredit terbesar selama periode 2014-2017 di Indonesia adalah untuk modal kerja dengan total sebesar Rp 7.854.978 miliar rupiah dan konsumsi sebesar Rp 4.614.792 miliar rupiah. Sementara penggunaan kredit untuk investasi sendiri sebesar Rp 4.199.805 miliar rupiah.

Agar BPR dapat terus memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian ke arah yang lebih baik maka pihak BPR harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit. Mulyawan (2015) menjelaskan prinsip dasar manajemen keuangan adalah memahami kondisi pasar yang ada agar mampu mengurangi risiko dan memperoleh laba lebih besar. Artinya selain faktor internal perusahaan, maka seorang manajer harus memperhatikan faktor eksternal perusahaan dalam mengambil kebijakan penyaluran kredit. Indikator makro ekonomi sebagai faktor eksternal sangat berpengaruh terhadap kegiatan perbankan dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Esti dan Wulandari (2012) menjelaskan suku bunga merupakan faktor penting dalam memberikan profit atau keuntungan bagi perbankan. Melihat dari segi makroekonomi saat terjadi inflasi di mana harga barang mengalami kenaikan maka pihak perbankan akan merespon dengan menaikkan suku bunga agar memperoleh keuntungan. Yoga dan Yuliarmi (2013) menjelaskan bahwa faktor eksternal yang merupakan indikator pertumbuhan ekonomi makro untuk di daerah salah satunya adalah PDRB. Semakin tinggi PDRB yang merupakan gambaran pendapatan regional masyarakat mencerminkan meningkatnya kemampuan bisnis di daerah tersebut. Investor akan tertarik untuk melakukan investasi salah satunya melalui kredit perbankan. Sehingga pihak perbankan dapat memberikan penyaluran kredit lebih besar dengan asumsi bahwa risiko kredit bermasalah tidak akan terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Abudanti (2016) menyebutkan bahwa penyaluran kredit dipengaruhi oleh DPK (Dana Pihak Ketiga), ROA (*Return On Asset*), Inflasi dan Suku Bunga. Penelitian ini mengambil beberapa faktor eksternal yang dimungkinkan berpengaruh terhadap penyaluran kredit yaitu inflasi, suku bunga, dan PDRB.

Igirisa (2017) menjelaskan bahwa secara luas inflasi diartikan sebagai adanya peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus. Sehingga dapat diartikan bahwa kenaikan harga barang tertentu saja belum bisa dikatakan sebagai inflasi. Terjadinya inflasi berpengaruh terhadap penyaluran kredit karena asumsi investasi di pasar barang. Pergerakan inflasi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Pergerakan Inflasi di Indonesia

Tahun	Inflasi (%)
2014	8,36
2015	3,35
2016	3,02
2017	3,61

Sumber: www.bi.go.id, data diolah 2019.

Inflasi di Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi. Berdasarkan informasi pada tabel 1.3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 inflasi mencapai 8,36% dan mengalami penurunan 5,01% menjadi 3,35% di tahun 2015. Pada tahun 2016 inflasi menurun sebesar 0,33% menjadi 3,02% dan tahun 2017 inflasi meningkat sebesar 0,59% menjadi 3,61%. Inflasi yang tinggi mengindikasikan bahwa harga barang mengalami kenaikan yang tinggi pula. Hal tersebut akan mendorong pinjaman kredit pada perbankan semakin meningkat karena masyarakat membutuhkan uang lebih banyak untuk dapat memenuhi kebutuhan akan barang tersebut.

Masyarakat harus membayar sejumlah biaya tambahan ketika meminjam uang. Samuelson dan Nordhaus (1995) mengatakan bahwa tingkat bunga adalah pembayaran yang dilakukan untuk penggunaan uang. Kholisudin (2012) mengungkapkan bahwa untuk mengatur tingkat bunga perbankan nasional, bank sentral salah satunya menggunakan instrumen penentuan tingkat bunga acuan dalam hal ini adalah *BI Rate*. *BI Rate* kemudian akan menjadi patokan dalam penentuan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pergerakan *BI Rate* menjadi tolok ukur bagi tingkat suku bunga lainnya. Kenaikan *BI Rate* akan mendorong kenaikan suku bunga yang berlaku di perbankan, baik suku bunga pinjaman maupun suku bunga simpanan. Sebaliknya ketika *BI Rate* diturunkan oleh BI, maka perbankan akan merespon penurunan *BI Rate* tersebut dengan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman dan simpanan yang diberlakukan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir tingkat suku bunga mengalami fluktuasi. Pergerakan *BI Rate* dapat dilihat pada Tabel 1.4.

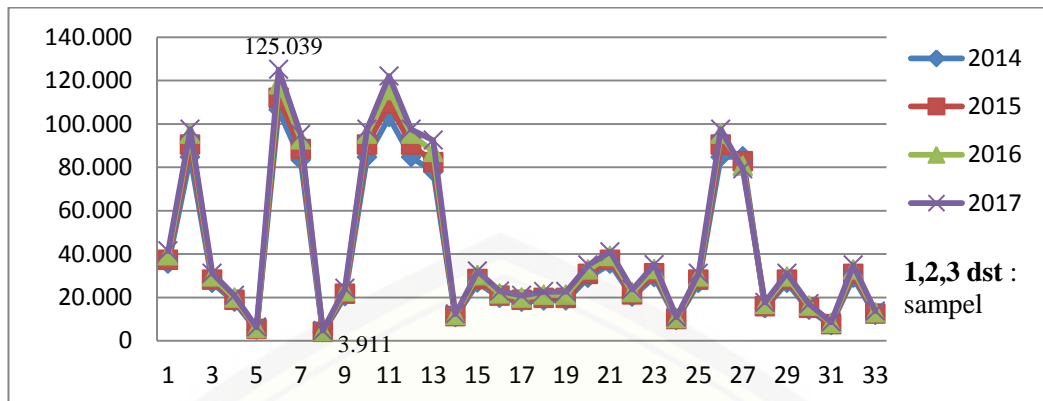
Tabel 1.4 Pergerakan BI Rate di Indonesia

Tahun	BI Rate (%)
2014	7,75
2015	7,5
2016	6,5
2017	6,5

Sumber: www.bi.go.id, data diolah 2019.

Berdasarkan Tabel 1.4 perkembangan suku bunga BI Rate tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi. Selama tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2014-2016 suku bunga mengalami penurunan yang cukup signifikan, tahun 2014 suku bunga sebesar 7,75% kemudian terjadi penurunan di tahun 2015 menjadi 7,5%. Terjadi penurunan kembali tingkat suku bunga sebesar 1% ketika tahun 2016 dari 7,5% menjadi 6,5%. BI Rate sebagai suku bunga acuan yang mengalami penurunan mengindikasikan bahwa tingkat bunga SBI juga akan menurun. Suku bunga SBI inilah yang nantinya memengaruhi suku bunga deposito dan kredit di perbankan.

Eswanto, dkk. (2016) mengatakan PDRB adalah suatu cerminan dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu. Dengan melihat nilai PDRB disuatu daerah maka dapat ditaksir rata-rata pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Selain itu, peningkatan nilai PDRB juga menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah tersebut sehingga akan berdampak juga pada kredit yang akan disalurkan BPR kepada para investor. BPR dapat melihat kondisi perekonomian yang ada di masyarakat berdasarkan nilai PDRB yang tinggi atau rendah. Total PDRB beberapa kota di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.5



Sumber: Lampiran 1, data diolah 2019

Gambar 1.1 Total Nilai PDRB Beberapa Kota di Indonesia periode 2014-2017
(dalam miliar rupiah)

Gambar 1.1 mengungkapkan bahwa jumlah total PDRB tertinggi periode 2014-2017 terjadi di sampel no.6 tahun 2017 sebesar Rp 125.039 miliar rupiah, sedangkan PDRB terendah terjadi di sampel no.8 tahun 2014 sebesar Rp 3.911 miliar rupiah. Berdasarkan lampiran 1, sampel no.6 merupakan daerah Kab. Sidoarjo sedangkan sampel no.8 merupakan daerah Kab. B. Mongondow. Nilai PDRB yang tinggi mengindikasikan bahwa di daerah Kab.Sidoarjo memiliki pendapatan rata-rata yang diterima masyarakat juga tinggi. Sebaliknya, nilai PDRB yang rendah mengindikasikan bahwa di daerah Kab. B. Mongondow memiliki pendapatan rata-rata yang diterima masyarakat juga rendah.

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwa inflasi pada dasarnya merupakan gambaran dari kondisi kenaikan harga barang yang terjadi secara terus menerus dan berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun. BPR perlu mengetahui pergerakan inflasi untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan masyarakat akan uang sehingga dapat memperkirakan volume penyaluran kredit yang dapat diberikan. Tingkat suku bunga yang tinggi akan menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam melakukan pinjaman kredit. Masyarakat akan berasumsi ketika suku bunga tinggi maka kewajiban membayar bunga hutang juga semakin bertambah. BPR sebagai lembaga perbankan diharapkan dapat memberikan solusi dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat lebih besar dengan tingkat suku bunga yang relatif

rendah dari bank lainnya. Dengan begitu masyarakat akan semakin semangat untuk berbisnis maupun berinvestasi. Hal tersebut akan berdampak pada pendapatan masyarakat yang meningkat karena kegiatan bisnis berjalan dengan baik. PDRB yang tinggi mengindikasikan bahwa pendapatan regional masyarakat juga tinggi sehingga kemampuan untuk membayar pinjaman kredit pada perbankan dapat terjamin. Dengan melihat nilai PDRB yang mencerminkan pendapatan regional masyarakat, BPR dapat menganalisa kemungkinan dari adanya risiko kredit bermasalah. Selanjutnya BPR dapat mengambil kebijakan penyaluran kredit dengan tepat dan mampu memberikan keuntungan.

Melihat volume penyaluran kredit yang tidak terlalu meningkat dari tahun 2014-2017 mengindikasikan bahwa kontribusi BPR dalam memberikan kredit ternyata masih rendah. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana pengaruh variabel-variabel independen yang meliputi inflasi, suku bunga, dan PDRB terhadap variabel dependen yaitu penyaluran kredit. Penelitian ini dilakukan pada BPR yang terdaftar di BI periode 2014-2017, dengan judul penelitian yaitu pengaruh inflasi, suku bunga, dan PDRB terhadap penyaluran kredit pada BPR di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Apakah inflasi berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada BPR di Indonesia?
- 2) Apakah suku bunga berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada BPR di Indonesia?
- 3) Apakah PDRB berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada BPR di Indonesia?
- 4) Apakah inflasi, suku bunga, dan PDRB berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada BPR di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap penyaluran kredit pada BPR di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh suku bunga terhadap penyaluran kredit pada BPR di Indonesia.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB terhadap penyaluran kredit pada BPR di Indonesia.
- 4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi, suku bunga dan PDRB terhadap penyaluran kredit pada BPR di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan keberagaman ilmu pengetahuan sehingga mampu menjadi sebuah kontribusi teoritis berkaitan dengan pengaruh inflasi, suku bunga, dan PDRB terhadap penyaluran kredit pada BPR di Indonesia.

1.4.2 Bagi Akademisi

Penelitian terkait penyaluran kredit ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan kepustakaan sehingga dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenis.

1.4.3 Manfaat Praktis

Bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi wadah untuk mempraktekkan ilmu yang diperoleh selama kuliah terhadap masalah yang sesungguhnya terjadi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Manajemen Keuangan

Mulyawan (2015) mendefinisikan manajemen keuangan merupakan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk memperoleh, menggunakan, serta mengalokasikan dana yang dimiliki perusahaan secara efisien. Sedangkan Musthafa (2017) mengungkapkan bahwa manajemen keuangan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang beberapa keputusan yang meliputi keputusan investasi, keputusan pendanaan maupun keputusan dividen atau pemberian keuntungan. Sutrisno (2013) juga memberi pengertian bahwa manajemen keuangan merupakan suatu aktivitas perusahaan yang dipegang dan diperankan serta dilakukan manajer keuangan, dimana aktivitas tersebut berupa pencatatan, pengendalian, pembuatan laporan, serta pencarian dana.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan segala kegiatan yang memiliki kaitan dengan proses pengelolaan dana perusahaan yang meliputi kegiatan pencatatan hingga proses pengendalian dengan tujuan untuk melakukan pengambilan keputusan.

a. Tujuan Manajemen Keuangan

Musthafa (2017) mengemukakan tujuan manajemen keuangan adalah sebagai berikut.

1) Pendekatan Keuntungan dan Risiko

Pendekatan keuntungan dan risiko berkaitan dengan penciptaan keuntungan atau pencapaian laba yang maksimal dengan meminimalkan risiko yang ada. Pencapaian laba yang maksimal tersebut memiliki tujuan agar perusahaan memperoleh laba yang besar, sedangkan proses meminimalkan risiko tersebut berupa pengurangan biaya operasional agar tercapainya efisiensi.

2) Pendekatan Likuiditas Profitabilitas

Pendekatan likuiditas profitabilitas berkaitan dengan dijaganya likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Likuiditas memiliki arti bahwa perusahaan harus selalu menyediakan uang kas untuk membayar kewajiban finansial jangka

pendek. Sedangkan profitabilitas memiliki arti bahwa perusahaan harus terus berusaha untuk memperoleh laba perusahaan untuk pencapaian tujuan jangka panjang.

b. Fungsi Manajemen Keuangan

Mushtafa (2017) menyatakan fungsi manajemen keuangan meliputi keputusan investasi (*investment decision*), keputusan pendanaan (*financing decision*), serta keputusan dividen (*dividend policy*). Keputusan investasi merupakan keputusan untuk menggunakan dana dan membuat pemilik dana menjadi makmur. Sedangkan keputusan pendanaan merupakan keputusan untuk memenuhi dana perusahaan untuk menunjang kegiatan operasi perusahaan. Sementara itu, keputusan dividen merupakan keputusan untuk memberikan laba kepada para pemilik saham dalam bentuk dividen atau tetap menahannya dalam bentuk laba ditahan.

c. Prinsip Dasar Manajemen Keuangan

Mulyawan (2015) memberikan prinsip manajemen keuangan sebagai berikut:

1) Keseimbangan risiko dan pengembalian

Adanya dua tipe investor yang memilih risiko yang tinggi dengan harapan mendapat tingkat pengembalian yang tinggi, dan ada pula investor yang memilih risiko rendah. Maka dari itu, perlu adanya pengendalian risiko agar para investor dapat memperoleh pengembalian investasinya.

2) Nilai waktu uang yang diterima hari ini lebih berharga dari uang yang diterima di masa depan

Uang yang akan diperoleh saat ini akan berbeda nilainya saat digunakan di masa depan untuk investasi. Maka dari itu, manajemen keuangan memiliki konsep yang berkaitan dengan nilai waktu dari uang agar dapat memperoleh keuntungan.

3) Kondisi persaingan pasar

Semakin tinggi tingkat persaingan akan membuat perusahaan memperoleh proyek dengan laba yang besar, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Memahami kondisi pasar yang ada
 - b) Tidak melupakan fokus penciptaan, pemanfaatan dan ketidaksempurnaan kondisi pasar
 - c) Menciptakan pemahaman yang tepat atas arus kas untuk perusahaan.
- 4) Pasar modal yang efisien
- Pasar modal dikatakan efisien apabila memiliki harga yang tepat. Serta mampu memanipulasi pendapatan melalui perubahan sistem akuntansi yang tidak akan merubah harga saham
- 5) Pertambahan arus kas
- Pertambahan arus kas perlu dilakukan agar aktivitas keuangan perusahaan dapat dibandingkan dengan aliran kas yang ada. Sehingga segala bentuk pengambilan keputusan akan didasarkan pada besarnya kas perusahaan tersebut.
- 6) Tidak semua risiko sama
- Karena besarnya risiko dalam setiap investasi berbeda-beda, maka perlu adanya pengendalian risiko agar risiko tersebut dapat diversifikasi. Melalui diversifikasi maka risiko dalam perusahaan akan bisa diukur dan beberapa risiko akan bisa dikurangi.
- 7) Melakukan sesuatu yang benar adalah perilaku yang etis, dan ada banyak dilema etika dalam manajemen keuangan
- Tanggung jawab sosial perusahaan perlu dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban perusahaan dan sikap peduli perusahaan terhadap masyarakat sekitar selain kepada pemegang saham.

2.1.2 Manajemen Kredit dan Manajemen Likuiditas

Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menjelaskan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Kasmir (2012) menjelaskan bahwa manajemen kredit merupakan pengelolaan kredit mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai pada pengendalian dan pengawasan kredit macet. Adapun jenis kredit yang dilihat dari segi kegunaan, dibagi menjadi.

1) Kredit Investasi

Merupakan kredit yang diberikan untuk melakukan kegiatan investasi perusahaan yang membutuhkan modal lebih dalam mengembangkan usahanya.

2) Kredit Modal Kerja

Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha yang sudah berjalan termasuk menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan serta kegiatan operasional lainnya.

3) Kredit Konsumsi

Merupakan kredit yang diberikan untuk kebutuhan konsumsi secara pribadi. Kredit jenis ini digunakan untuk kebutuhan yang memang tidak ditujukan untuk pengembangan usaha melainkan kebutuhan pribadi seseorang atau sekelompok orang saja.

Haryanto (2017) menjelaskan bahwa penyaluran kredit oleh perbankan sejalan dengan teori penawaran uang dan teori manajemen likuiditas. Teori manajemen likuiditas tersebut mencakup *Commercial Loan Theory*, *Shiftability Theory*, *Anticipated Income Theory* dan *The Liability Management Theory*. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

1) *Commercial Loan Theory*

Perbankan dalam melakukan penyaluran kredit adalah kredit jangka pendek. Hal ini dimasukan agar kredit tersebut dapat mengurangi risiko bank dalam kredit bermasalah.

2) *Shiftability Theory*

Perbankan dapat memindahkan aktivitya ke orang lain atau badan dengan harga yang dapat diramalkan sehingga sewaktu-waktu bank membutuhkan. Dana baik untuk penyaluran kredit maupun penarikan dana nasabah bank dapat segera dilakukan.

3) *Anticipated Income Theory*

Penyaluran kredit memiliki risikonya masing-masing atau tidak ada kredit yang *self-liquidating*, hal ini menunjukkan bahwa bank dapat menyalurkan kredit baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan tetap mempertimbangkan kredit bermasalah.

4) *The Liability Management Theory*

Upaya perbankan untuk menyediakan likuiditas dalam bentuk pasiva. Hal ini dapat dilakukan perbankan sebagai upaya untuk meningkatkan likuiditas dan memperkecil beban operasional bank yaitu dengan menyediakan likuiditas dengan pinjaman jangka pendek antar bank (*call money*).

2.2 Kredit

Suryadinata, dkk. (2018) mengatakan bahwa kredit merupakan salah satu produk lembaga keuangan bank atau bukan bank yang menjadi penawaran terhadap konsumennya. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menjelaskan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan bentuk produk suatu badan usaha perbankan yang menyediakan dana berupa uang di mana terdapat balas jasa atau imbalan berupa bunga sesuai dengan kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman. Kredit menjadi sebuah penawaran yang diberikan oleh lembaga perbankan kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan uang.

2.2.1. Tujuan Kredit

Terdapat berbagai tujuan dengan dilakukannya kredit, baik bagi perbankan serta nasabah atau konsumen yang melakukan kredit itu sendiri. Menurut Kasmir (2008), adapun tujuan kredit yaitu sebagai berikut.

- a. Mencari keuntungan yang bertujuan memperoleh hasil dari pemberian kredit. Hasil yang didapat dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana baik dana yang digunakan untuk investasi, konsumsi maupun untuk modal kerja.

- c. Membantu pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik. Karena dengan hal tersebut diketahui bahwa adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan kredit tidak hanya ditujukan kepada perusahaan atau perbankan secara pribadi, namun juga bagi nasabah atau konsumen. Pemberian kredit diharapkan mampu mendorong minat nasabah atau konsumen dalam berbisnis sehingga mampu membantu pemerintah dalam menggerakkan pertumbuhan serta perkembangan pembangunan nasional.

2.2.2 Fungsi Kredit

Selain tujuan adanya kegiatan kredit, terdapat beberapa fungsi yang diperoleh dari kredit tersebut. Rimsky (2002) menyebutkan beberapa fungsi kredit antara lain sebagai berikut.

- a. Meningkatkan daya guna uang

Para pemilik uang atau modal yang berlebih, baik secara langsung atau melalui penyimpanan di bank, dapat meminjamkan uangnya kepada individu atau perusahaan yang membutuhkan dana untuk meningkatkan usaha atau bisnisnya.

- b. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Dengan adanya kredit, pengusaha yang kesulitan dalam produksi misalnya, dapat terbantu untuk memproses bahan baku menjadi barang jadi yang siap dikonsumsi oleh orang banyak atau masyarakat luas.

- c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran dengan menggunakan uang giral seperti cek, bilyet giro, dan lainnya yang sejenis.

- d. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Kredit dapat digunakan sebagai alat pengendalian ekonomi. Dalam keadaan yang tidak menguntungkan seperti inflasi, pemerintah dapat membatasi pemberian kredit. Sebaliknya dalam keadaan ekonomi yang lesu karena

deflasi, pemerintah dapat melonggarkan kebijakan pemberian kredit sehingga akan memacu minat pengusaha untuk melakukan kegiatan bisnis.

e. Meningkatkan kegairahan berusaha

Pihak-pihak terkait seperti pengusaha atau pebisnis yang usahanya terhambat karena kekurangan modal dapat meningkatkan usahanya melalui bantuan kredit yang diberikan oleh bank.

f. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan adanya kredit, perusahaan-perusahaan dapat meningkatkan usahanya bahkan dapat mendirikan proyek baru yang akan membutuhkan tenaga kerja. Sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru yang nantinya mengurangi pengangguran dan meningkatkan perkembangan perekonomian.

Fungsi-fungsi kredit sejalan dengan apa yang menjadi tujuan kredit sebelumnya. Berdasarkan fungsi kredit di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit dapat menjadi alat untuk meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna dan peredaran barang, sebagai alat stabilitas perekonomian, mampu meningkatkan kegairahan berusaha yang berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan. Sehingga dapat diketahui bahwa jika fungsi kredit berjalan dengan baik dan benar maka dapat membantu perusahaan, nasabah atau konsumen, dan lingkungan secara nasional merasakan dampak dari pengaruh kredit.

2.2.3 Prinsip Pemberian Kredit

Penilaian yang dilakukan salah satunya menggunakan analisis 5C. Purba (2016) memberikan penjelasan mengenai prinsip 5C sebagai berikut.

a. *Character*

Analisis watak dari peminjam sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena kredit adalah kepercayaan yang diberikan kepada peminjam sehingga peminjam haruslah pihak yang benar-benar dapat dipercaya dan beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman.

b. *Capacity*

Setelah aspek watak maka faktor berikutnya yang sangat penting dalam analisis kredit adalah faktor kemampuan. Jika tujuan analisis watak adalah

untuk mengetahui kesungguhan nasabah melunasi hutangnya, maka tujuan analisis kemampuan adalah untuk mengukur kemampuan membayar.

c. *Capital*

Modal atau ekuitas merupakan hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dengan kewajiban yang ada. Analisis modal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban resiko yang mungkin dialami perusahaan.

d. *Collateral*

Unsur lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam analisis kredit adalah agunan atau jaminan. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition of Economy*

Penilaian kredit hendaknya juga dilihat dari kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Berdasarkan kriteria yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa perbankan sebelum memberikan kredit kepada nasabah atau peminjam dana membutuhkan analisis yang meliputi karakter dari peminjam, kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjaman, adanya jaminan yang mampu disediakan oleh peminjam serta kondisi sosial ekonomi yang sedang atau akan terjadi di masa depan.

2.3 Inflasi

Inflasi adalah terjadinya suatu kenaikan tingkat harga secara keseluruhan (Baily dan Friedman 1995). Nopirin (2009) mengatakan bahwa inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa inflasi merupakan tingkat kenaikan dari harga-harga umum komoditas atau barang dan jasa secara keseluruhan dan terjadi secara terus menerus. Pendapat lain disampaikan oleh Lubis (2013) yang menjelaskan bahwa inflasi yang disebabkan oleh peraturan pemerintah di mana pada umumnya dipengaruhi oleh guncangan dari pengumuman harga yang dibuat oleh pemerintah seperti harga subsidi BBM, listrik, transportasi umum, dan lain sebagainya.

2.3.1 Komponen Inflasi

Ekawarna dan Facruddiansyah (2010) menyatakan inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Ada tiga komponen agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi yaitu sebagai berikut.

a. Kenaikan harga

Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi dari pada harga periode sebelumnya. Perbandingan tingkat harga bisa dilakukan dengan jarak waktu yang lebih panjang, misalnya seminggu, sebulan, triwulan dan setahun.

b. Bersifat umum

Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan berdampak inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik.

c. Berlangsung terus-menerus

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan menimbulkan inflasi jika terjadinya hanya sesaat. Karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal sebulan. Sebab dalam sebulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus. Rentang waktu yang lebih panjang adalah triwulan dan tahunan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu kondisi dapat dikatakan mengalami inflasi apabila terjadi kenaikan harga dalam waktu yang relatif panjang. Selain itu juga kenaikan harga suatu barang dapat menyebabkan kenaikan harga barang umum lain secara keseluruhan. Kondisi ini akan terus terjadi sehingga menimbulkan dampak kenaikan harga yang berlangsung dalam rentang waktu antara triwulan hingga tahunan.

2.3.2 Macam-Macam Inflasi

Inflasi atau yang biasa disebut sebagai kenaikan harga barang yang berlangsung secara terus menerus pada dasarnya memiliki berbagai macam jenis. Hal ini didasarkan pada sudut pandang bagaimana melihat inflasi itu sendiri. Eswanto, dkk. (2016) menggolongkan inflasi menjadi 3 sebagai berikut.

- a. Penggolongan pertama didasarkan atas parah tidaknya inflasi tersebut
 - 1) Inflasi ringan (di bawah 10% setahun)
 - 2) Inflasi sedang (antara 10% - 30% setahun)
 - 3) Inflasi berat (antara 30% - 100% setahun)
 - 4) Hiper inflasi (di atas 100% setahun)
- b. Penggolongan yang kedua atas dasar sebab-musabab awal inflasi
 - 1) Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat
 - 2) Inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi, ini disebut *cost inflation*
- c. Penggolongan yang ketiga adalah berdasarkan asal dari inflasi
 - 1) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*)
 - 2) Inflasi yang berasal dari luar negeri (*Imported inflation*)

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa inflasi dapat dibedakan berdasarkan golongan tertentu. Penggolongan pertama yaitu menurut parah tidaknya inflasi yang meliputi inflasi ringan, sedang, berat dan hiper inflasi. Penggolongan inflasi yang lain yaitu berdasarkan sebab-musabab awal inflasi serta penggolongan berdasarkan asal inflasi terjadi yang meliputi inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri.

2.4 Suku Bunga

Miller, dkk. dalam Puspoproto (2004) menyatakan bahwa bunga adalah sejumlah dana, dinilai dalam uang yang diterima kreditur sedangkan suku bunga adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman. Suku bunga merupakan sejumlah rupiah yang dibayar akibat telah mempergunakan dana sebagai balas jasa. Kasmir (2008) yang menyatakan bahwa suku bunga merupakan balas jasa yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas penggunaan sejumlah uang. Aryaningsih (2008) mengatakan bahwa perubahan suku bunga merupakan perubahan dalam permintaan uang kredit. Kenaikan suku bunga mengakibatkan penurunan permintaan agregat atau pengeluaran investasi. Sebaliknya, peningkatan suku bunga akan mengakibatkan peningkatan permintaan agregat.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan suku bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai bentuk balas jasa karena telah melakukan pinjaman uang. Sehingga dengan kata lain suku bunga merupakan sejumlah harga dari penggunaan uang yang digunakan saat ini dan harus dikembalikan di masa yang akan datang.

2.4.1 Macam-Macam Suku Bunga

Menurut Abimanyu (2004) suku bunga adalah *asset financial* secara umum, suku bunga dapat dibedakan ke dalam suku bunga nominal dan suku bunga riil.

a. Suku Bunga Nominal

Suku bunga nominal adalah kewajiban membayar atau hak untuk mendapatkan bunga pada tingkat tertentu tanpa memperhatikan tingkat inflasi. Suku bunga nominal terdiri dari suku bunga nominal atas pinjaman dan suku bunga nominal atas tabungan.

b. Suku Bunga Riil

Suku bunga riil adalah suku bunga nominal dikurangi dengan tingkat inflasi. Kenyataannya, peminjam dan penabung cenderung lebih memperhatikan suku bunga riil dibandingkan suku bunga nominal.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa suku bunga pada dasarnya terdiri dari dua jenis yaitu suku bunga nominal dan suku bunga riil. Suku bunga nominal didasarkan pada tingkat bunga tertentu tanpa ada perhitungan inflasi, sedangkan suku bunga riil merupakan tingkat suku bunga yang memperhitungkan nilai inflasi.

2.4.2 Perubahan Suku Bunga

Ditria, dkk. (2008) menjelaskan bahwa suku bunga dapat berubah apabila salah satu dari *demand or supply* uang tidak lagi mencapai suatu keseimbangan. Pada saat perekonomian memasuki tahap ekspansi dan meningkatkan *Gross Domestic Product* (GDP) maka akan meningkatkan transaksi keuangan. Hal tersebut dapat mengakibatkan permintaan terhadap uang juga akan meningkat di mana penawarannya tetap sama. Ketika terjadi ketidakseimbangan ini, maka suku bunga akan bergerak agar tercapai kembali keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang.

2.4.3 Suku Bunga SBI

Kholisudin (2012) menjelaskan bahwa sebagai bank yang mempunyai otoritas terhadap fluktuasi nilai rupiah, BI berusaha melakukan kontrol inflasi dan kebijakan-kebijakan lainnya. BI melakukan penguatan operasi moneter dengan menggunakan suku bunga acuan yaitu *BI Rate*. Salah satu tujuan BI menerapkan *BI Rate* adalah sebagai upaya untuk menekan tingkat laju inflasi. Ketika inflasi meningkat maka BI akan meningkatkan nilai *BI Rate* guna menarik para investor untuk menanamkan dananya melalui SBI. Pendapat serupa disampaikan oleh Siamat (2005) yang mengatakan bahwa *BI Rate* adalah suku bunga dengan tenor 1 bulan yang diumumkan oleh BI secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal adanya kebijakan moneter. Pada dasarnya perubahan *BI Rate* menunjukkan penilaian BI terhadap prakiraan Inflasi ke depan dibandingkan dengan sasaran inflasi yang ditetapkan.

Sari dan Abudanti (2016) yang berpendapat bahwa suku bunga SBI merupakan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh BI sebagai patokan bagi suku bunga pinjaman maupun simpanan bagi bank atau lembaga-lembaga keuangan di seluruh Indonesia. Mekanisme pasar berperan dalam menentukan tingkat suku bunga ini berdasarkan sistem lelang. Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Andes, dkk. (2017) yang mengatakan bahwa SBI adalah surat berharga sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang diterbitkan oleh BI. SBI diterbitkan oleh BI sebagai salah satu piranti operasi pasar terbuka, kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh BI dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter. Tingkat suku bunga ini ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang (PBI No. 4/10/PBI/2002).

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suku bunga SBI merupakan suatu alat yang dikeluarkan oleh BI dan digunakan untuk mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat. Suku bunga SBI ini yang nantinya akan menjadi patokan dalam penentuan suku bunga pinjaman dan suku bunga tabungan.

2.5 PDRB

Eswanto, dkk. (2016) menjelaskan bahwa PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dengan melihat dari nilai PDRB yang meningkat maka dapat diketahui perkembangan pendapatan rata-rata yang diterima oleh masyarakat.

2.5.1 Fungsi PDRB

PDRB memiliki beberapa fungsi yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur suatu perkembangan perekonomian. Adapun fungsi dari PDRB menurut Yoga dan Yuliarmi (2013) adalah sebagai berikut.

- a. Menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah atau provinsi sehingga mampu mengetahui pendapatan yang dapat diterima oleh masyarakat.

- b. Digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. PDRB menurut sektor menunjukan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor perekonomian dalam suatu wilayah. Sedangkan PDRB menurut penggunaan menunjukkan bagaimana produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan juga diperdagangkan dengan pihak luar.
- c. PDRB menurut penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri maupun perdagangan antar pulau dan provinsi. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan PDRB perkapita atau persatu orang.

Berdasarkan uraian di atas maka fungsi dari PDRB yaitu sebagai alat untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa yang pada akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Dengan mengetahui nilai PDRB maka dapat diketahui bahwa sumber daya yang dimanfaatkan oleh masyarakat mampu dimaksimalkan dengan baik atau tidak.

2.5.2 Komponen PDRB

Akmal (2014) menjelaskan Produk Domestik Regional Bruto atau disingkat PDRB tersusun atas komponen-komponen sebagai berikut.

- a. Produk Domestik

Produk domestik adalah barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah domestik tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari penduduk wilayah tersebut atau tidak.

- b. Produk Regional

Produk regional adalah produk domestik ditambah dengan pendapatan yang diterima dari luar daerah dikurangi dengan pendapatan yang dibayar ke luar daerah. Jadi, produk regional bisa disebut pendapatan bersih daerah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa PDRB tersusun dari produk domestik dan produk regional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah.

2.5.3 Jenis PDRB

Fitriani, dkk. (2013) membagi PDRB ke dalam dua jenis.

- a. PDRB atas harga berlaku, yaitu merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun yang bersangkutan. Perkembangan PDRB atas dasar berlaku dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan PDRB yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan dalam tingkat harganya.
- b. PDRB atas harga konstan, yaitu merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu yang menjadi tahun dasar. Untuk dapat mengukur perubahan volume produksi atau perkembangan produksi secara nyata, faktor pengaruh harga perlu dihilangkan dengan cara menghitung PDRB atas dasar harga konstan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa PDRB berdasarkan jenis perhitungan terdiri atas PDRB berdasarkan harga berlaku dan PDRB berdasarkan harga konstan. Perbedaan keduanya terletak pada perhitungan pengaruh harga yang dalam PDRB atas harga konstan tidak diperhitungkan, sedangkan dalam PDRB atas harga berlaku pengaruh harga menjadi bahan pertimbangan yang diperhitungkan.

2.6 Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank

Martono (2002) mengungkapkan bank adalah salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral. Muchtar (2016)

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan merupakan sebuah badan atau lembaga usaha yang menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya kepada masyarakat.

Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Sudirman (2013) menjelaskan bahwa lembaga keuangan bank sebelum tahun 1983 terdiri dari bank umum, bank tabungan, bank pembangunan, dan bank sentral. Setelah tahun 1983 hingga saat ini bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Muchtar (2016) menjelaskan terkait lembaga keuangan bukan bank yang meliputi pasar modal, asuransi, pegadaian, *multifinance*, dana pensiun, serta lembaga lain yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua bentuk lembaga keuangan yang terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat.

2.6.1 Bank Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, mendefinisikan bank umum sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Muchtar (2016) menjelaskan fungsi dari bank umum sebagai berikut.

a. Agent of Trust

Fungsi ini membuktikan bahwa bank menerapkan sistem kepercayaan dalam kegiatan operasionalnya. Bank dalam kedudukannya sebagai kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman kepada nasabah atau masyarakat harus merasa yakin dan percaya bahwa nasabah tersebut akan menjalankan fungsi serta kewajibannya sebagai debitur.

b. Agent of Development

Fungsi ini berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi yang meliputi berbagai kegiatan seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Bank sebagai lembaga pembiayaan berperan dalam menjembatani semua kepentingan pelaku ekonomi dalam kegiatan atau transaksi ekonomi.

c. Agent of Service

Perbankan di samping memberikan pelayanan jasa keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat ke masyarakat, maka bank juga turut serta dalam memberikan jasa pelayanan yang lain seperti jasa transfer, jasa kotak pengamanan, dan jasa penagihan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka fungsi bank umum meliputi dari *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service*. Sebagai lembaga pembiayaan yang menyediakan jasa pemberian kredit maka bank harus memiliki fungsi kepercayaan kepada nasabah. Selain itu perbankan memiliki tanggung jawab untuk menunjang kegiatan transaksi pelaku ekonomi. Selain sebagai lembaga intermediasi, perbankan juga memiliki beberapa fungsi lain seperti penyedia jasa transfer dan sebagainya.

2.6.2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Muchtar (2016) menjelaskan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Budisantoso (2015) juga menjelaskan bahwa BPR merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa BPR merupakan lembaga pembiayaan perbankan yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah serta melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah.

Budisantoso (2015) menjelaskan beberapa hal terkait asas, tujuan dan fungsi lembaga pembiayaan BPR sebagai berikut.

a. Asas BPR

Bank perkreditan rakyat melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi sendiri merupakan asas yang mengedepankan kemakmuran masyarakat.

b. Tujuan BPR

Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Fungsi BPR

Penyaluran kredit bukan satu-satunya fungsi BPR, masih terdapat fungsi lain seperti menerima simpanan dari masyarakat atau dengan kata lain berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat.

Pendapat lain disampaikan oleh Prawiroardjo (1995) yang mengatakan bahwa usaha BPR meliputi beberapa hal sebagai berikut.

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasional yang dilakukan sebuah BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Tujuan utamanya yaitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian kredit atau penyediaan dana bagi nasabahnya. Artinya BPR tidak dapat beroperasi apabila mengalami kerugian dan kebangkrutan.

Muchtar (2016) memberikan penjelasan penting terkait bagaimana mengukur tingkat kesehatan BPR. Tingkat kesehatan BPR menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja BPR dalam kegiatan operasionalnya. Sesuai dengan Surat Direktur Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR 1997, adapun aspek yang dapat dinilai meliputi aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas (CAMEL: *Capital, Asset, Management, Earnings, Liquidity*).

Tabel 2.1 Tolok Ukur Tingkat Kesehatan Bank

Faktor Camel	Bobot
Permodalan	30%
Kualitas Aktiva Produktif	30%
Manajemen	20%
Rentabilitas	10%
Likuiditas	10%

Sumber: Muchtar 2016, data diolah.

Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat Budisantoso (2015) bahwa penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMEL sebagai berikut.

a. Permodalan (*Capital*)

Penilaian ini meliputi beberapa hal seperti kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), komposisi permodalan, aset produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal bank serta kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan.

b. Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Penilaian ini dilihat dari kecukupan kebijakan dan prosedur aset produktif, tingkat kecukupan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP), serta aset produktif yang diklasifikasikan dibandingkan total aset produktif.

c. Manajemen (*Management*)

Penilaian dilakukan melalui komponen seperti manajemen umum, penerapan sistem manajemen resiko serta kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada BI atau pihak lain.

d. Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian rentabilitas dapat diketahui dari komponen seperti *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Net Interest Margin (NIM)*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) serta prospek laba operasional.

e. Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian likuiditas dapat diketahui dari komponen seperti rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga, stabilitas dana pihak ketiga, serta aset likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan liabilitas likuid kurang dari 1 bulan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk menilai tingkat kesehatan bank dapat dilihat dan dianalisis menggunakan CAMEL, yang terdiri dari komponen permodalan, kualitas aset, manajemen, *earning*, dan likuiditas. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja perbankan dalam kegiatan operasionalnya.

2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dijadikan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat menambah serta memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang diajukan. Selain itu juga penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai pembandingan dalam menyusun penelitian yang akan dilakukan. Peneliti telah menganalisis penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik bahasan di dalam penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Esti dan Wulandari (2012) menggunakan variabel suku bunga kredit dan dana pihak ketiga yang diuji pengaruhnya terhadap penyaluran kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan pada variabel suku bunga kredit dan pengaruh positif dan signifikan pada variabel dana pihak ketiga yang diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen penelitian yaitu penyaluran kredit.

Yoga dan Yuliarmi (2013) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel bebas yang terdiri dari dana pihak ketiga, produk domestik regional bruto, suku bunga, dan *Non Performing Loan* (NPL). Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan, produk domestik regional bruto tidak berpengaruh signifikan, suku bunga berpengaruh negatif signifikan dan *Non Performing Loan* (NPL) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.

Purba, dkk. (2016) menggunakan dana pihak ketiga, *Non Performing Loan* (NPL), suku bunga, LDR, BOPO dan ROA sebagai variabel bebas dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan LDR berpengaruh positif signifikan, *Non Performing Loan* (NPL) dan suku bunga serta BOPO berpengaruh negatif signifikan, sedangkan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.

Sari dan Abudanti (2016) melakukan penelitian dengan menggunakan dana pihak ketiga, ROA, inflasi dan suku bunga sebagai variabel bebas. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan sedangkan ROA, inflasi dan suku bunga berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank umum.

Gift (2017) melakukan penelitian dengan meneliti variabel bebas yang meliputi variabel dana pihak ketiga, suku bunga, serta *Non Performing Loan* (NPL) sebagai variabel bebas. Untuk metode penelitiannya, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis *Multiple Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga *Non Performing Loan* (NPL) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, sementara suku bunga memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap penyaluran kredit.

Igirisa (2017) menggunakan suku bunga, inflasi, dan nilai tukar sebagai variabel independen yang diuji pengaruhnya terhadap penyaluran kredit. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan, inflasi tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan, sedangkan nilai tukar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penyaluran kredit yang digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian.

Selvie, dkk. (2017) menggunakan variabel antara lain dana pihak ketiga, suku bunga, dan modal sebagai variabel independen yang diuji pengaruhnya terhadap penyaluran kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan modal bank berpengaruh positif dan signifikan sedangkan suku bunga tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit.

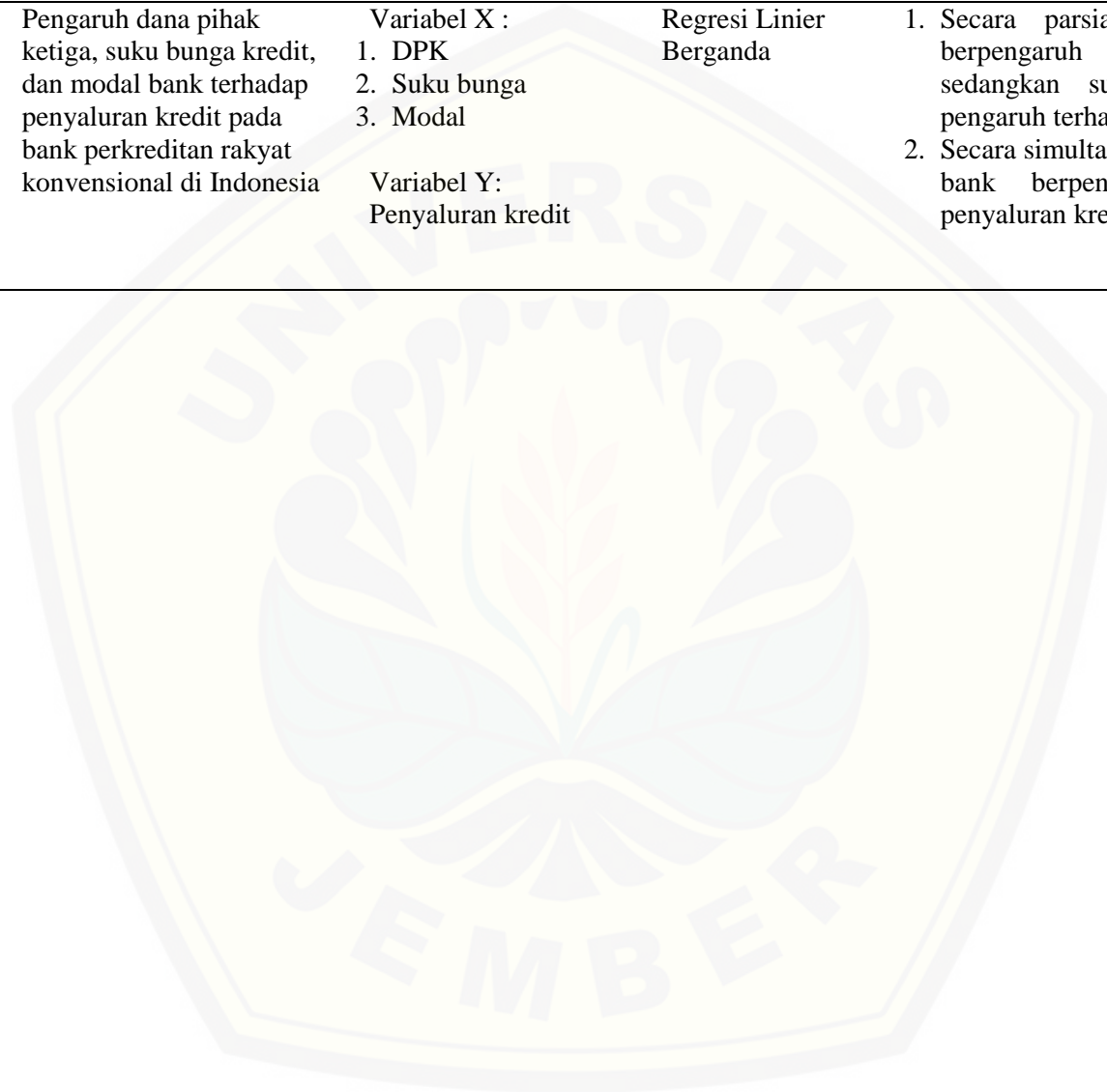
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan, maka peneliti memilih variabel inflasi, suku bunga, dan PDRB sebagai variabel yang diukur pengaruhnya terhadap penyaluran kredit BPR. Dasar pemilihan variabel ini adalah adanya ketidakkonsistensian hasil pada penelitian sebelumnya. Peneliti menemukan bahwa pada penelitian terdahulu yang telah disebutkan, terdapat hasil penelitian yang berbeda sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam. Selain itu penelitian ini memfokuskan variabel tersebut karena adanya permasalahan yang mempengaruhi penyaluran kredit BPR yang di lihat dari segi eksternal perusahaan yang telah dikemukakan peneliti pada latar belakang penelitian ini.

Tabel 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	Esti dan Wulandari (2012)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit investasi bank persero	Variabel X : 1. Suku bunga 2. Dana Pihak Ketiga Variabel Y: Penyaluran kredit	Regresi Linear Berganda	1. Secara simultan variabel suku bunga kredit dan dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. 2. Secara parsial variabel suku bunga kredit berpengaruh negatif signifikan, sedangkan dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit.
2.	Yoga dan Yuliarmi (2013)	Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit BPR di Provinsi Bali	Variabel X : 1. DPK 2. PDRB 3. Suku Bunga 4. NPL Variabel Y: Penyaluran kredit	Regresi Linier Berganda	1. Secara parsial DPK berpengaruh positif signifikan, PDRB tidak berpengaruh signifikan, suku bunga berpengaruh negatif signifikan dan NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. 2. Secara simultan DPK, PDRB, suku bunga dan NPL berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.
3.	Purba, dkk. (2016)	Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyaluran kredit pada BPR konvensional di Indonesia	Variabel X : 1. DPK 2. NPL 3. Suku Bunga 4. LDR 5. BOPO 6. ROA Variabel Y: Penyaluran kredit	Regresi Linier Berganda	1. Secara parsial DPK dan LDR berpengaruh positif signifikan, NPL dan suku bunga serta BOPO berpengaruh negatif signifikan, sedangkan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. 2. Secara simultan DPK, NPL, suku bunga, LDR, BOPO, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.

4.	Sari dan Abudanti (2016)	Pengaruh DPK, ROA, Inflasi dan suku bunga SBI terhadap penyaluran kredit pada bank umum	Variabel X : 1. DPK 2. ROA 3. Inflasi 4. Suku bunga Variabel Y: Penyaluran kredit	Regresi Linier Berganda	1. Secara parsial DPK berpengaruh positif signifikan, sedangkan ROA, inflasi dan suku bunga berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank umum. 2. Secara simultan DPK, ROA, inflasi dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank umum.
5.	Gift (2017)	Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di provinsi Riau tahun 2006-2015	Variabel X: 1. Dana Pihak Ketiga 2. Suku Bunga 3. <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Variabel Y: Penyaluran Kredit	<i>Multiple Regression Analysis</i> (MRA)	1. Secara simultan Dana Pihak Ketiga, Suku Bunga, dan NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. 2. Secara parsial Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan, Suku Bunga berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan NPL berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit.
6.	Igirisa (2017)	Pengaruh suku bunga, inflasi dan nilai tukar terhadap penyaluran kredit pada perbankan di Kota Samarinda	Variabel X : 1. Suku Bunga 2. Inflasi 3. Nilai Tukar Variabel Y: Penyaluran kredit	Regresi Linier Berganda	1. Secara simultan suku bunga, inflasi dan nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. 2. Secara parsial suku bunga berpengaruh negatif signifikan, inflasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan, sedangkan nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit.

7. Selvie, dkk. (2017)	Pengaruh dana pihak ketiga, suku bunga kredit, dan modal bank terhadap penyaluran kredit pada bank perkreditan rakyat konvensional di Indonesia	Variabel X : 1. DPK 2. Suku bunga 3. Modal Variabel Y: Penyaluran kredit	Regresi Linier Berganda	1. Secara parsial DPK dan modal bank berpengaruh positif dan signifikan sedangkan suku bunga tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit. 2. Secara simultan DPK, suku bunga dan modal bank berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.
------------------------	---	---	-------------------------	--



2.8 Hubungan Antar Variabel

2.8.1 Hubungan Inflasi dengan Penyaluran Kredit

Hossain (2010) menjelaskan bahwa inflasi disebabkan kebijakan moneter dan fiskal yang ekspansif, sehingga terjadi kelebihan uang beredar di masyarakat akan menyebabkan terjadinya kelebihan permintaan barang dan jasa di sektor riil. Dampak inflasi dapat mendorong retribusi pendapatan di masyarakat, penurunan efisiensi ekonomi, perubahan di dalam output dan kesempatan kerja juga dapat menyebabkan lingkungan yang tidak stabil (*unstable environment*) bagi keputusan ekonomi. Mulyawan (2015) mengungkapkan bahwa dalam manajemen keuangan, seorang manajer harus mengetahui kondisi persaingan pasar untuk dapat memperoleh laba yang besar. Semakin naiknya harga, maka seseorang akan berusaha untuk meminimalisir kebutuhan yang ada. Hal tersebut berdampak pada minat atau daya beli masyarakat yang berkurang. Ketika terjadi inflasi yang menimbulkan kenaikan harga maka akan muncul ketidakseimbangan ekonomi sehingga bisnis akan lesu, kegiatan investasi akan melemah. Oleh karena itu, dengan adanya inflasi akan berpengaruh terhadap penyaluran kredit BPR.

2.8.2 Hubungan Suku Bunga dengan Penyaluran Kredit

Gift (2017) mengatakan bahwa perubahan kredit sangat dipengaruhi oleh suku bunga. Hal tersebut terjadi jika suku bunga yang berlaku tinggi maka sektor perbankan cenderung untuk membeli surat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang memiliki keuntungan yang lebih stabil dibandingkan dengan memberikan kredit kepada investor yang lebih beresiko. Sesuai dengan teori *Anticipated Income* bahwa penyaluran kredit memiliki risikonya masing-masing. Seorang manajer keuangan tentu akan berusaha mengurangi resiko yang mungkin ditimbulkan dengan adanya kredit yang bermasalah. Kebijakan BPR dengan membeli surat berharga maka otomatis akan mengurangi jumlah *reserve bank*, sehingga jumlah kredit yang disalurkan akan berkurang, dan hal ini akan membuat pertumbuhan pada dunia usaha dan implikasinya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional.

2.8.3 Hubungan PDRB dengan Penyaluran Kredit

Eswanto, dkk. (2016) mengatakan bahwa melihat nilai PDRB yang meningkat maka dapat diketahui perkembangan pendapatan rata-rata yang diterima oleh masyarakat. Hal ini berarti peningkatan PDRB mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Yoga dan Yuliarmi (2013) menjelaskan bahwa semakin tingginya PDRB yang merupakan gambaran dari pendapatan regional akan mencerminkan meningkatnya juga kemampuan investasi masyarakat. Dengan adanya peningkatan pendapatan maka minat untuk berbisnis maupun investasi semakin tinggi. Kasmir (2002) menjelaskan bahwa manajemen kredit merupakan pengelolaan kredit yang berkaitan dengan perencanaan jumlah kredit dan analisis pemberian kredit. Menganalisis kondisi masyarakat dengan mengetahui pendapatan yang tinggi maka dapat menggambarkan bahwa masyarakat telah berhasil meningkatkan kegiatan usaha maupun investasi. Manajer keuangan perbankan akan mudah untuk merencanakan penyaluran kredit dengan asumsi bahwa perekonomian sedang baik sehingga resiko kredit bermasalah dapat diminimalisir.

2.9 Kerangka Konseptual

Pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi tolok ukur keberhasilan suatu perekonomian. Perkembangan ekonomi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila minat masyarakat akan dunia usaha seperti investasi ataupun kegiatan ekonomi lainnya mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam menjalankan sebuah bisnis atau usaha terkadang masyarakat membutuhkan dukungan dana. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pinjaman kredit pada lembaga pembiayaan. Disinilah sektor perbankan memiliki peran yang cukup penting. Perbankan berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat ke masyarakat.

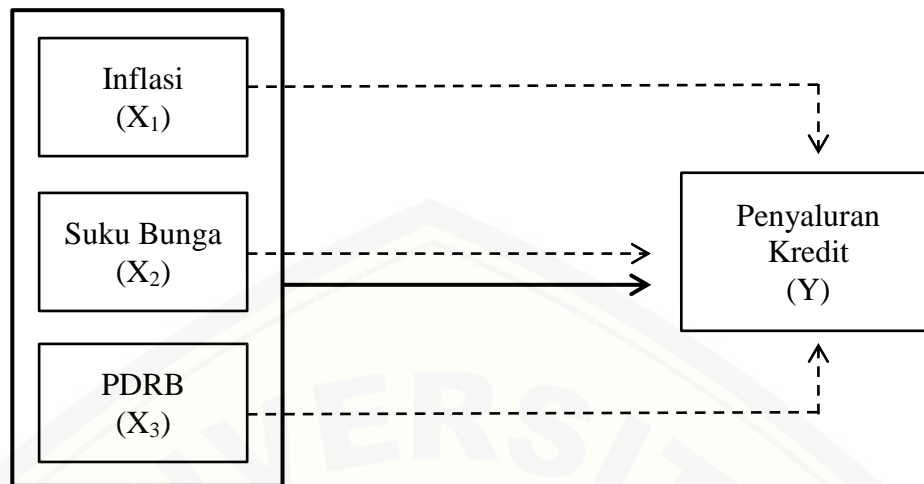
Lembaga pembiayaan perbankan seperti BPR menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan suntikan dana untuk kegiatan bisnisnya. Yoga dan Yuliarmi (2013) mengatakan bahwa BPR menjadi pilihan tepat karena dalam kualitasnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dari segi lokasi

yang mudah untuk dijangkau, prosedur yang lebih sederhana, serta lebih mengutamakan pendekatan personal dan kemudahan dalam model pinjaman. Dikatakan mudah dijangkau karena BPR merupakan lembaga pembiayaan perbankan yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia dengan jumlah yang terdaftar di BI hingga tahun 2017 mencapai 1621 unit.

Meningkatnya jumlah penyaluran kredit oleh BPR tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu inflasi, suku bunga, dan PDRB.

- a. Inflasi, kenaikan tingkat harga barang secara terus menerus disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kemampuan ekonomi masyarakat terhadap keinginannya akan barang-barang. Ketika harga barang terus mengalami kenaikan maka daya beli masyarakat akan menurun. Salah satu cara agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya yaitu dengan melakukan pinjaman kredit. Namun kondisi perekonomian yang tidak stabil sangat beresiko bagi perbankan untuk menyalurkan kredit.
- b. Suku bunga, penurunan tingkat suku bunga dapat menjadi daya tarik bagi pengusaha maupun pelaku ekonomi lainnya untuk melakukan pinjaman kredit. Hal tersebut akan berdampak pada perkembangan bisnis karena mereka berasumsi bahwa dengan tingkat suku bunga yang rendah maka kewajiban mereka mengembalikan pinjaman beserta bunga menjadi ringan.
- c. PDRB, indikator yang mewakili nilai pendapatan rata-rata yang diterima oleh masyarakat. Ketika PDRB mengalami kenaikan maka pendapatan masyarakat juga meningkat sehingga minat untuk berbisnis dan investasi juga semakin tinggi. Penyaluran kredit juga akan meningkat karena resiko kredit bermasalah dapat diminimalisir.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat digambarkan kerangka konseptual pada gambar 2.1 di mana variabel inflasi, suku bunga, dan PDRB memengaruhi penyaluran kredit.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan:

-----> = Parsial
 —————> = Simultan

2.10 Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata *hypo* yang berarti bahwa dan *thesa* yang berarti kebe naran. Menurut Hasan (2010) hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris. Berdasarkan pada penelitian terdahulu dan uraian dalam hubungan antar variabel maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₁ = Inflasi berpengaruh terhadap penyaluran kredit BPR

H₂ = Suku Bunga berpengaruh terhadap penyaluran kredit BPR

H₃ = PDRB berpengaruh terhadap penyaluran kredit BPR

H₄ = Inflasi, suku bunga, dan PDRB berpengaruh terhadap penyaluran kredit BPR

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Umar (1997) menjelaskan bahwa rancangan penelitian adalah suatu rencana dan struktur penyelidikan yang dibuat agar diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti merancang atau mendesain riset yang akan digunakan untuk keperluan pemecahan masalah dalam penelitian. Berdasarkan pemaparan latar belakang, rumusan permasalahan serta tujuan dari penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Pendapat lain disampaikan oleh Sugiyono (2012) bahwa yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan data berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan analisis statistik. Penelitian kuantitatif dipilih karena data yang diperoleh peneliti berupa data angka dan untuk menguji hipotesisnya harus menggunakan uji statistik. Data yang digunakan oleh peneliti meliputi data permintaan kredit, inflasi, suku bunga, dan PDRB.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel (Umar, 1997). Pendapat sejenis juga disampaikan oleh Sugiyono (2012) yang mengatakan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Subjek penelitian ini adalah lembaga pembiayaan BPR dengan objek yang diteliti adalah penyaluran kredit. Populasi dalam penelitian ini adalah BPR di Indonesia berjumlah 1.643.

3.3.2 Sampel

Sampel yang diambil dalam penelitian harus benar-benar mewakili populasi. Maka dari itu, sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang diambil untuk diteliti dan karakteristiknya hendak diduga (Umar, 1997). Roscoe dalam buku *Research Methods For Business* yang dikutip oleh Sugiyono (2012), memberikan saran terkait penentuan ukuran sampel dalam penelitian sebagai berikut.

- a. Ukuran sampel dalam sebuah penelitian dikatakan layak apabila mencapai jumlah 30 s/d 500.
- b. Apabila sampel terbagi dalam beberapa kategori, maka jumlah minimal masing-masing kategori yaitu 30.
- c. Penelitian yang menggunakan analisis multivariabel seperti korelasi atau regresi berganda, maka jumlah sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti.
- d. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana jumlah sampel masing-masing kelompok antara 10 s/d 20.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel yang bersifat tidak acak dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan salah satu teknik pengumpulan sampel penelitian yang dilakukan berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Peneliti telah menentukan berbagai pertimbangan dengan kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam pengambilan sampel penelitian dan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Penentuan Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	BPR yang terdaftar di BI periode 2014-2017	1.643
2.	BPR dengan total asset terbesar	100
3.	BPR yang mempublikasikan laporan keuangan lengkap periode 2014-2017	36
4.	BPR yang tidak mengalami kerugian periode 2014-2017	33
Sampel akhir		33

Berdasarkan tabel 3.1 di atas dapat diketahui bahwa populasi penelitian yaitu BPR yang terdaftar di BI periode 2014-2017 sejumlah 1.643. Selanjutnya populasi tersebut diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria sehingga terpilih sampel akhir sejumlah 33 sampel. Adapun tujuan penentuan sampel berdasarkan kriteria tersebut adalah untuk memastikan bahwa sampel merupakan BPR yang terdaftar di BI periode 2014-2017 dan memiliki kinerja keuangan yang baik serta tidak mengalami kerugian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Ghozali (2014) menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data runtut waktu, data antar waktu dan gabungan keduanya atau *pooled data*. Sedangkan Riadi (2016) mengklasifikasikan data menurut sumber pengambilan maka data terbagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang runtut waktu. Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan runtut waktu karena berdasarkan observasi yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, data sekundernya diperoleh dari data perusahaan yaitu BPR yang termasuk dalam kriteria penelitian. Selain itu juga data dan informasi diperoleh dari media elektronik seperti internet, literatur dari perpustakaan serta hasil penelitian terdahulu.

3.4 Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukurannya

Singarimbun dan Effendi (2006) menyatakan bahwa variabel merupakan konsep yang memiliki variasi nilai. Sedangkan definisi operasional adalah unsur penelitian yang menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Pendapat lain oleh Moh. Nazir dalam Widodo (2015) menjelaskan terkait skala pengukuran rasio, di mana ukuran rasio adalah ukuran yang mencakup semua ukuran yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu penyaluran kredit, serta variabel independen yang meliputi inflasi, suku bunga, dan PDRB.

3.4.1 Penyaluran Kredit

Penyaluran kredit adalah keseluruhan total kredit yang diberikan oleh masing-masing BPR di Indonesia yang menjadi sampel penelitian. Data operasional yang digunakan adalah data statistik berdasarkan perhitungan tahunan dan dinyatakan dalam bentuk miliar rupiah. Data tersebut berupa jumlah penyaluran kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan BPR dan dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode tahun 2014-2017.

3.4.2 Inflasi

Inflasi adalah tingkat kenaikan harga dalam persen yang terjadi selama kurun waktu tertentu dan diukur dengan menggunakan IHK (Indeks Harga Konsumen). Indeks harga konsumen adalah perbandingan relatif dari harga barang dan jasa pada suatu periode dibandingkan dengan harga-harga barang dan jasa tersebut pada tahun dasar, dan dinyatakan dalam persen (Gilarso, 2004). Data diperoleh dari statistik inflasi di Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam tahun penerbitan 2014-2017 dan dinyatakan dalam bentuk persen per tahun. Berikut rumus perhitungan menurut Gilarso (2004).

$$\text{INFLASI} = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}_0}{\text{IHK}_0}$$

Keterangan:

IHK_n = Indeks Harga Konsumen periode ini

IHK_0 = Indeks Harga Konsumen periode sebelumnya

3.4.3 Suku Bunga

Sari dan Abudanti (2016) menjelaskan bahwa tingkat suku bunga yang diwakili oleh SBI ditentukan melalui mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang (PBI No. 4/10/PBI/2002). Suku bunga SBI merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh BI dengan mengacu pada BI *Rate* dan dijadikan tingkat bunga standar oleh bank pemerintah dan bank swasta. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data besarnya tingkat bunga SBI per 1 bulan yang dikeluarkan Bank Indonesia berupa data hasil lelang dan dinyatakan dalam bentuk persen.

3.4.4 PDRB

PDRB yang digunakan atas dasar harga konstan merupakan sejumlah nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan usaha atau sektor perekonomian dalam suatu wilayah pada tahun atau periode tertentu yang menjadi tahun dasar (Fitriani, dkk., 2013). Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data statistik PDRB daerah masing-masing BPR yang dipublikasikan oleh BPS Indonesia dalam tahun penerbitan 2014-2017 yang dinyatakan dalam bentuk miliar rupiah. Untuk menghitung nilai PDRB atas dasar harga konstan dapat dilakukan dengan rumus yang diungkapkan oleh Fitriani, dkk. (2013) sebagai berikut.

$$\text{PDRB} = \frac{\text{NTB atas HB}}{\text{IH}}$$

Keterangan :

PDRB= Produk Domestik Regional Bruto

NTB= Nilai Total Bruto

HB= Harga Berlaku

IH= Indeks Harga

3.5 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Pengumpulan data merupakan tahapan yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis analisis data sekunder dengan mengumpulkan data sekunder yang menjadi data utama dalam penelitian. Ada berbagai macam teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut.

a. Studi Pustaka

Rompas (2018) mengatakan bahwa studi pustaka merupakan tahapan yang digunakan untuk melakukan proses kajian teori atau hasil studi terdahulu. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mempelajari dan memahami literatur-literatur yang memuat pembahasan terkait dengan penelitian. Literatur yang digunakan oleh peneliti meliputi buku, artikel, jurnal, skripsi, dan hasil penelitian terdahulu.

b. Dokumentasi

Menurut Widoyoko (2013) analisis dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selain itu metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan atau data tahunan perusahaan perbankan atau BPR yang telah dipublikasikan.

Data yang sudah diperoleh selanjutnya akan dilakukan penentuan metode analisis dan pengujian hipotesis oleh peneliti. Adapun analisis dan pengujian hipotesis yang dilakukan adalah sebagai berikut.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Sugiyono (2014) menjelaskan statistik deskriptif merupakan statistik yang menggunakan penyajian data berupa tabel maupun grafik dan diagram serta penjelasan kelompok melalui mean, dan varian. Selain itu Gunawan (2016) menjelaskan tujuan dari statistik deskriptif adalah untuk mengubah kumpulan data mentah menjadi mudah dipahami dalam bentuk informasi yang lebih ringkas. Berdasarkan uraian tersebut maka analisis statistik deskriptif adalah memberikan gambaran terhadap variabel yang diteliti melalui data sampel dan populasi tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu penyaluran kredit serta variabel independen yang terdiri dari inflasi, suku bunga, dan PDRB.

3.5.2 Analisis Statistik Inferensial

Wilfrid dan Frank (1997) mengatakan bahwa inferensi statistik merupakan suatu cara membuat rampatan mengenai populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Sehingga dari beberapa sampel yang diambil dapat digunakan untuk menaksir populasinya. Pendapat lain oleh Gunawan (2016) menjelaskan bahwa statistik inferensial adalah metode yang digunakan untuk mengetahui populasi berdasarkan sampel dengan menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi sebuah kesimpulan.

a. Uji Asumsi Klasik

Eswanto, dkk. (2016) menjelaskan bahwa dalam analisis regresi linier berganda perlu dilakukan pengujian asumsi klasik agar hasil yang diperoleh lebih akurat. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi. Adapun penjelasan dari masing-masing uji asumsi klasik adalah sebagai berikut.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian signifikansi koefisien regresi (Ghozali, 2014). Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan tingkat keyakinan (α) sebesar 5%. Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymptotic Significance*) sebagai berikut (Sari dan Akbar, 2016).

- a) Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari populasi adalah normal.
- b) Jika probabilitas $< 0,05$ maka populasi tidak berdistribusi secara normal.

2) Uji Heteroskedastisitas

Sari dan Abudanti (2016) mengatakan bahwa situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya. Dengan demikian, agar koefisien-koefisien regresi tidak menyesatkan, maka situasi heteroskedastisitas tersebut harus dihilangkan dari model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar *scatterplot*. Deteksi dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu dalam grafik dimana sumbu X dan Y telah diproduksi. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut (Ghozali, 2014).

- a) Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur seperti gelombang, melebar, menyempit maka dikatakan terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, serta menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3) Uji Multikolinearitas

Ghozali (2014) menjelaskan multikolinieritas adalah adanya hubungan linier yang sempurna dan pasti di antara atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Indikasi awal adanya multikolinieritas adalah *standard error* yang tinggi dan nilai t-statistik yang rendah (Gujarati, 1997). Sedangkan pendapat lain disampaikan oleh Hasan (2002) yang menjelaskan bahwa multikolinieritas berarti antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain dalam model regresi saling berkorelasi linier. Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Kriteria yang digunakan yaitu multikolinearitas terjadi apabila nilai VIF > 10 dan sebaliknya jika nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Sari dan Akbar, 2016).

4) Uji Autokorelasi

Sari dan Abudanti (2016) mendefinisikan uji autokorelasi sebagai korelasi antar observasi yang diukur berdasarkan deret waktu dalam model regresi atau dengan kata lain *error* dari observasi yang satu dipengaruhi oleh *error* dari observasi yang sebelumnya. Akibat dari adanya autokorelasi dalam model regresi, koefisien regresi yang diperoleh menjadi tidak efisien, artinya tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan koefisien regresi menjadi tidak stabil. Sedangkan pendapat lain oleh Ghozali (2014) mengatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (*residual*) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena *residual* (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari observasi ke observasi lainnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi akan digunakan uji Durbin Watson (DW) dengan pengambilan keputusan sebagai berikut (Erlina, 2011).

- a) Bila nilai Dw terletak antara batas atas (d_u) dan ($4-d_u$) maka tidak ada autokorelasi atau koefisien autokorelasi = 0.
- b) Bila nilai Dw lebih rendah dari batas bawah (d_l) maka ada autokorelasi positif atau koefisien lebih besar 0.
- c) Bila nilai Dw lebih besar dari ($4-d_l$) maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari 0 berarti ada autokorelasi negatif.
- d) Bila nilai Dw di antara batas atas (d_u) dan batas bawah (d_l) atau Dw terletak antara ($4-d_u$) maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Ghozali (2014) menjelaskan bahwa untuk menguji model pengaruh dan hubungan variabel bebas yang lebih dari dua variabel terhadap variabel dependen, digunakan teknis analisis regresi linear berganda (*multiple linear regression method*). Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, metode ini mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik guna mendapatkan hasil yang baik. Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini menurut Santosa dan Ashari (2005) dapat dispesifikasikan sebagai berikut.

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- | | |
|----------------------|---|
| Y | = Penyaluran Kredit |
| b_0 | = Konstanta |
| b_1, b_2 dan b_3 | = Koefisien regresi |
| X_1 | = Inflasi |
| X_2 | = Suku Bunga |
| X_3 | = Produk Domestik Regional Bruto |
| e | = <i>Error Term</i> (Variabel Pengganggu) |

c. Uji Hipotesis

Kholisudin (2012) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis pengujian hipotesis terhadap variabel dalam penelitian. Adapun Uji hipotesis yang ada meliputi uji t dan Uji F. Sedangkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu penyaluran kredit serta variabel independen yang meliputi inflasi, suku bunga, dan PDRB.

1) Uji statistik t

Kuncoro (2007) mengatakan bahwa uji t statistik melihat hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi-variabel terikat. Langkah-langkah dalam Uji t adalah sebagai berikut (Kholisudin, 2012).

a) Menentukan hipotesis:

- H_0 : variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- H_a : variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b) Menentukan tingkat signifikansi (α) yang digunakan, $\alpha = 5\%$

c) Kriteria penerimaan dan penolakan Hipotesis:

- Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- Jika probabilitas > 0.05 , Maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- Jika probabilitas < 0.05 , Maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

2) Uji statistik F

Kuncoro (2007) mengatakan bahwa pengujian ini akan memperlihatkan hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Adapun langkah-langkah uji F yaitu sebagai berikut (Kholisudin, 2012).

a) Menentukan hipotesis :

- H_0 : variabel independen secara bersama-sama tidak memengaruhi variabel dependen. Artinya bahwa tingkat inflasi, suku bunga dan PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit pada BPR di Indonesia.
- H_a : variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen. Artinya bahwa tingkat inflasi, suku bunga dan PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit pada BPR di Indonesia.

b) Menentukan tingkat signifikansi (α) yang digunakan, $\alpha = 5\%$

c) Membuat Keputusan

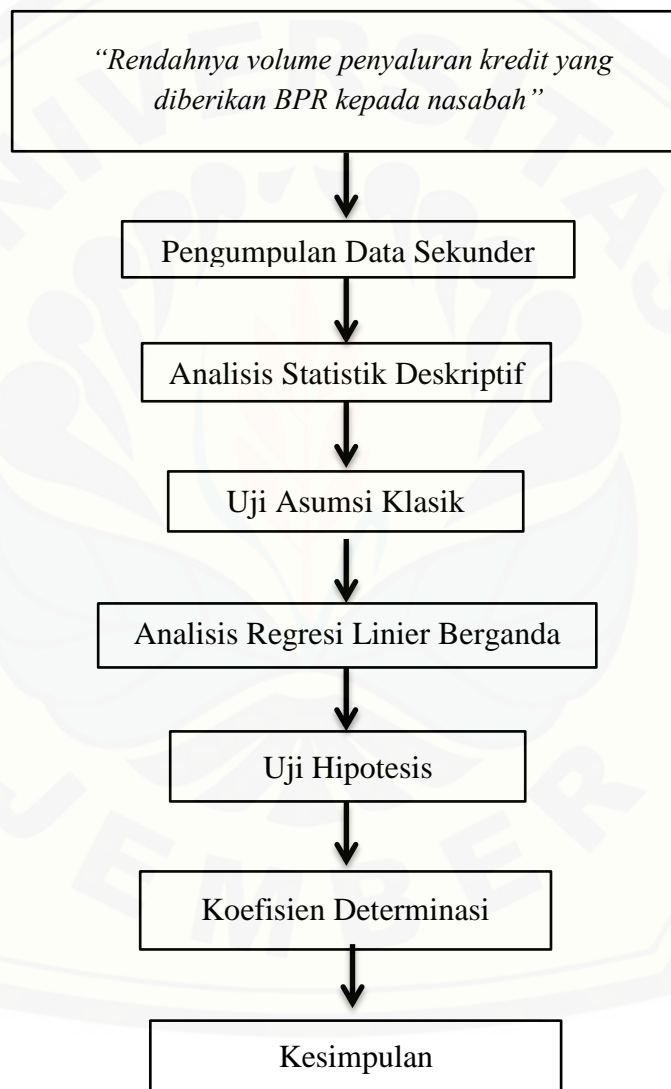
- 1) Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti variabel-variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

d. Koefisien Determinasi (R^2)

Rompas (2018) menjelaskan koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen yaitu penyaluran kredit. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil mengindikasikan bahwa kemampuan variabel-variabel independen yang terdiri dari inflasi, suku bunga dan PDRB dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Kuncoro, 2007). Pendapat lain oleh Tandris, dkk. (2014) menjelaskan pengukuran besarnya proporsi (persentase) sumbangan variabel bebas terhadap variabel tidak bebas sebagai berikut.

1. $R^2 =$ berada antara 0 dan 1 atau $-1 < R^2 < 1$
2. $R^2 = 1$ berarti persentase sumbangan X_1, X_2, X_3 , terhadap naik turunnya Y sebesar 100% dan tidak ada faktor lain yang memengaruhi Y .
3. $R^2 = 0$ berarti tidak ada kontribusi naik turunnya variabel bebas X_1, X_2, X_3 , terhadap naik turunnya variabel terikat (Y).

3.6 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Keterangan:

Masing-masing tahap dari kerangka pemecahan masalah di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Research Gap

Pemecahan masalah dalam penelitian ini diawali dengan menentukan riset gap penelitian. Peneliti menemukan permasalahan tentang masih rendahnya kontribusi BPR sebagai lembaga perbankan yang diharapkan menjadi pemacu pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di Indonesia yang akan diteliti menggunakan beberapa variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap volume kredit yang disalurkan oleh BPR.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber yang relevan dengan variabel dependen yaitu penyaluran kredit serta variabel independen yang meliputi inflasi, suku bunga, dan PDRB. Adapun sumber yang dimaksud antara lain website resmi Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

c. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini dilakukan oleh peneliti untuk menggambarkan secara umum terkait variabel-variabel yang digunakan di dalam penelitian. Hasil dari analisis statistik deskriptif ini akan menunjukkan pengukuran mean, nilai maksimal dan minimal, serta standar deviasi dari variabel-variabel penelitian.

d. Uji Asumsi Klasik

Peneliti akan melakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui kelayakan regresi yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun uji asumsi klasik menurut Kholisudin (2012) meliputi:

- 1) Uji normalitas, yaitu pengujian data untuk melihat normal tidaknya pendistribusian data dalam variabel penelitian.
- 2) Uji heteroskedastisitas, yaitu pengujian data dengan *output* berupa variansi dari seluruh data dalam variabel penelitian.

- 3) Uji multikolinearitas, yaitu pengujian data berupa pemberian informasi mengenai korelasi antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian.
 - 4) Uji autokorelasi, yaitu pengujian data dalam melihat hubungan linear antar variabel.
- e. Analisis Regresi Linier Berganda
- Setelah pengujian asumsi klasik selesai, maka peneliti akan melangkah pada tahap analisis pengaruh tidaknya variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian.
- f. Uji Hipotesis
- Pengujian hipotesis ini diperlukan oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel independen yang diuji memiliki pengaruh atau tidak, baik secara individu atau bersama-sama terhadap variabel dependen melalui uji statistik t dan uji statistik F :
- 1) Uji statistik t, berguna untuk melihat signifikansi secara parsial antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian.
 - 2) Uji statistik F, berguna untuk melihat pengaruh simultan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian.
- g. Koefisien Determinasi
- Koefisien determinasi diperlukan untuk mengetahui variansi dari variabel bebas yang digunakan dalam penelitian. Sekaligus juga berfungsi untuk melihat apakah variabel independen mampu memberikan informasi tentang keterkaitannya dengan variabel dependen dengan tujuan dan langkah selanjutnya adalah untuk melakukan penarikan kesimpulan.
- h. Kesimpulan
- Setelah semua tahap pengujian dilakukan maka peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah penelitian berdasarkan data serta analisis yang telah dilakukan sehingga sesuai dengan hasil yang ada.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Hasil koefisien regresi menunjukkan bahwa secara parsial inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit.
2. Hasil koefisien regresi menunjukkan bahwa secara parsial suku bunga berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.
3. Hasil koefisien regresi menunjukkan bahwa secara parsial PDRB berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.
4. Hasil pengujian F-test menunjukkan bahwa secara simultan inflasi, suku bunga, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam lembaga perbankan BPR di Indonesia, suku bunga dan PDRB berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Sebaliknya inflasi menunjukkan tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi pihak BPR disarankan ketika menyalurkan kredit maka harus memperhitungkan tingkat suku bunga yang harus dibayar oleh nasabah, karena suku bunga yang kompetitif akan berdampak pada tinggi rendahnya jumlah kredit yang bisa disalurkan BPR kepada nasabah.
2. Selain itu, BPR harus memperhatikan tingkat inflasi yang terjadi. Kebijakan yang diambil oleh BPR harus bisa menyesuaikan kondisi pasar dan tingkat PDRB yang mencerminkan pendapatan yang diterima nasabah itu sendiri. Sehingga penyaluran kredit yang tepat akan memacu pertumbuhan dan meningkatkan stabilitas ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Y. 2004. *Memahami Kurs Valuta Asing*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Akmal, A. H. dan R. Masbar. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit pada Bank Umum di Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 2(4): 45-56.
- Andes, S. L., Z. Puspitaningtyas. dan A. Prakoso. 2017. Pengaruh Inflasi, Kurs Rupiah dan Suku Bunga terhadap *Return Saham Perusahaan Manufaktur*. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. 10(2) : 8-16.
- Aryaningsih, N. N. 2008. Pengaruh Suku Bunga, Inflasi dan Jumlah Penghasilan Terhadap Permiintaan Kredit di PT BPD Cabang Pembantu Kediri. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains & Humaniora*. 2(1): 56-67.
- Baily, N. M. dan F. Philip 1995. *Macroeconomics, Financial Markets, and the International Sector (2nd Edition)*. New York: Irwin.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2013-2017*. BPS-Statistics Indonesia.
- Bank Indonesia. 2017. *Inflasi Indonesia periode tahun 2014-2017*
<https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx>. [Diakses pada 21 September 2018].
- _____. 2017. *Statistik Sitem Keuangan Indonesia*.
https://www.bi.go.id/id/statistik/sski/Pages/SSKI_Desember_2017.aspx. [Diakses pada 21 September 2018].
- _____. 2017. *Sertifikat Bank Indonesia periode tahun 2014-2017*
<https://www.bi.go.id/id/moneter/operasi/lelang-sbi/Default.aspx>. [Diakses pada 21 September 2018].
- Budisantoso, T. dan Nuritomo. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ditria, Y., J. Vivian. dan I. Widjaja. 2008. Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Ekspor terhadap Tingkat Kredit Perbankan. *Journal of Applied Finance and Accounting*. 1(1): 166-192.
- Ekawarna, dan Facruddiansyah. 2010. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Gaung Persadaa (GP Press).
- Erlina. 2011. *Metodologi Penelitian*. Medan : Usu Press.

- Esti, R., dan S. Wulandari. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Investasi Bank Persero. *Proceeding for Call Paper Pekan Ilmiah*. 339-352
- Eswanto, R. A., dan A.Oemar. 2016. Pengaruh Tingkat Suku Bunga Pinjaman, Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Inflasi dan PDRB terhadap Permintaan Kredit Bank Umum di Jawa Tengah Periode 2009-2013. *Journal of Accounting*. 2(2).
- Fitriani, A. Rusgiyono. dan T. Wuryandari. 2013. Perhitungan dan Analisis PDRB Kabupaten/Kota berdasarkan Harga Konstan. *Jurnal Gaussian*. 2(2): 109-118
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2014. *Ekonometrika : Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gift, V. 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit pada bank perkreditan rakyat (BPR) di Provinsi Riau tahun 2006-2015. *JOM Fekon*. 4(1) : 768-782
- Gilarso, T. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gunawan, I. 2016. *Pengantar Statistik Inferensial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Gujarati, D. 1997. *Econometric*. Erlangga. Jakarta: Erlangga.
- Harmanta, dan Ekananda. 2005. *Disintermediasai Fungsi Perbankan di Indonesia Pasca Krisis 1997: Faktor Permintaan atau Penawaran Kredit, Sebuah Pendekatan Model Disequilibrium*. Jakarta: Buletin Ekonomi.
- Haryanto, S. dan E. T. Widyarti. 2017. Analisis pengaruh NIM, NPL, BOPO, BI Rate dan CAR terhadap penyaluran kredit bank umum *go public* periode tahun 2012-2016. *Diponegoro Journal of Management*. 6(4): 1-11
- Hasan, I. 2010. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. 5 ed. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hidayat, A. 2018. *Tabel Durbin-Watson Test:5% Tingkat Signifikasnsi*. <http://www.stanford.edu>. [Diakses pada 3 Desember 2018]
- Hossain, A. A. 2010. *Bank Sentral dan Kebijakan Moneter di Asia Pasifik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Igirisa, I. 2017. Pengaruh suku bunga, inflasi dan nilai tukar terhadap penyaluran kredit pada perbankan di kota Samarinda. *eJournal Administrasi Bisnis*. 5(4): 904-916
- Junaidi. 2010. *Titik Presentase Distribusi t $d.f = 1-200$* <http://junaidichaniago.wordpress.com>. [Diakses pada tanggal 3 Desember 2018]
- Junaidi. 2010. *Titik Persentase Distribusi F , Probabilitas=0,05*. <http://junaidichaniago.wordpress.com>. [Diakses pada tanggal 3 Desember 2018]
- Kasmir. 2008. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kholisudin. 2012. Determinan Permintaan Kredit Pada Bank Umum di Jawa Tengah 2006-2010. *Economics Development Analysis Journal*. 1(1): 10-18.
- Kuncoro, M. 2007. *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Lubis, I. F. 2013. Analisis Hubungan antara Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Kasus Indonesia. *QE Journal*. 3(1).
- Martono. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia Fakultas Ekonomi UI.
- Muchtar, B., R. Rahmidani. dan M. K. Siwi. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana.
- Mulyawan, S. 2015. *Manajemen Keuangan : Pengantar Prof. Dr H. Mohammad Najib*. Bandung: Pustaka Setia.
- Musthofa. 2017. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: ANDI
- Nopirin. 1996. *Ekonomi Moneter buku 1*. Yogyakarta: BPF.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Peringkat BPR berdasarkan total asset* <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Statistik-BPR-Konvensional/Default.aspx> [Diakses pada 19 September 2018]
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Laporan Keuangan Perbankan*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx>. [Diakses pada 19 September 2018]

- Prawiroardjo, P. 1995. *Undang-undang Perbankan No.7 Tahun 1992*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Purba, N. N., Y, Syaukat. dan N. A. Maulana. 2016. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Penyaluran Kredit pada BPR Konvensional di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*. 2(2): 105-117.
- Puspoprano, S. 2004. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan (konsep, teori dan realita)*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Riadi, E. 2016. *Statistika Penelitian*. Yogyakarta: ANDI
- Rimsky, K. 2002. *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rompas, W. F. 2018. Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar terhadap Permintaan Kredit pada Perbankan di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 18(2): 204-215.
- Sari, M. J. dan N. Abudanti. 2016. Pengaruh DPK, ROA, Inflasi dan Suku Bunga SBI terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Umum. *E-Jurnal Manajemen Unud*. 5(11): 7156-7184
- Sari, R. dan A. Akbar. 2016. Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Tingkat Inflasi terhadap Permintaan Kredit pada PT.BPR Agritrans Batumarta. *Jurnal Ekonomika*. 9(1): 164-182.
- Santosa, P. Dan Ashari. 2005. *Analisis Statistik Dengan Microsoft Exel Dan SPSS*. Yogyakarta: AND.
- Samuelson dan Nordhaus. 1995. *Micro economic*. USA: Prentice Hall.
- Samuelson dan Nordhaus. 2003. *Ilmu Makroekonomi*. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Selvie, S., M. Arfan. dan S. Abdullah. 2017. Pengaruh dana pihak ketiga, suku bunga kredit, dan modal bank terhadap penyaluran kredit pada bank perkreditan rakyat konvensional di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi*. 6(2) : 52-58
- Siamat, D. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Singarimbun, M. Dan S. Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

- Sudirman, I. W. 2013. *Manajemen Perbankan, Menuju Bankir Konvensional Yang Profesional*.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmono. 2004. *Pengantar Ekonometrika Makro: Teori, Soal dan Penyelesaiannya*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Suryadinata, N., A. Toha. Dan A. Prakoso. 2018. Peran Sistem Pengendalian Internal dalam Menekan Angka Kredit Macet (Studi Kasus pada PT. FIFGROUP Kantor Cabang Jember). *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*. 11(2): 183-200
- Sutrisno. 2013. *Manajemen Keuangan : Teori Konsep & Aplikasi*. Yogyakarta : Penerbit Ekonisia.
- Tandris, P. T. dan S. Murni. 2014. Suku Bunga, Inflasi dan Nilai Tukar Pengaruhnya Terhadap Permintaan Kredit Perbankan di Kota Manado. *Jurnal Emba*. 2(1): 243-253.
- Umar, H. 1997. *Metodologi Penelitian: Aplikasi dalam Pemasaran*. Cet: 1. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan*. 10 Nopember 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Jakarta.
- Widodo, Arif. 2015. Faktor-Faktor Makroekonomi yang Mempengaruhi Permintaan Uang di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. 16(1): 63-72.
- Widoyoko, E. P. 2013. *Teknik Menyusun Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wilfrid, J. D. dan F. J. Massey. 1997. *Pengantar Analisis Statistik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Yoga, G. A. Dan N. Yuliarmi. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit BPR di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 2(6): 284-293.

Lampiran 1. Data Penelitian

A. Inflasi (dalam persen)

	Tahun	2014	2015	2016	2017
Bulan					
Januari		8,22	6,96	4,14	3,49
Februari		7,75	6,29	4,42	3,83
Maret		7,32	6,38	4,45	3,61
April		7,25	6,79	3,60	4,17
Mei		7,32	7,15	3,33	4,33
Juni		6,70	7,26	3,45	4,37
Juli		4,53	7,26	3,21	3,88
Agustus		3,99	7,18	2,79	3,82
September		4,53	6,83	3,07	3,72
Oktober		4,83	6,25	3,31	3,58
November		6,23	4,89	3,58	3,30
Desember		8,36	3,35	3,02	3,61

Sumber: www.bi.go.id, data diolah 2019

B. Suku Bunga SBI

	Tahun	2014	2015	2016	2017
Bulan					
(a)		(b)	(c)	(d)	(e)
Januari		7,24	6,96	6,65	5,90
Februari		7,21	6,69	6,65	5,90
Maret		7,18	6,68	6,60	5,94
April		7,13	6,65	6,60	5,94
Mei		7,18	6,66	6,60	5,97
Juni		7,13	6,66	6,40	5,97
Juli		7,15	6,68	6,40	5,93
Agustus		7,04	6,75	6,40	5,50
September		7,04	7,10	6,15	5,20

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Oktober		6,93	7,10	5,90	5,22
November		6,93	7,10	5,90	5,21
Desember		6,97	7,10	5,90	5,20

Sumber: www.bi.go.id, data diolah 2019

C. PDRB (dalam miliar rupiah)

No. (a)	BPR (b)	Kab/Kota (c)	2014 (d)	2015 (e)	2016 (f)	2017 (g)	Total (h)
1.	PT. BPR Supra Artapersada	Kab. Sukabumi	35.521	37.265	39.338	41.362	153.486
2.	PT. BPR Dana Nusantara	Kota Batam	84.644	90.458	95.370	97.460	367.932
3.	PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi	Kab. Sleman	26.713	28.098	29.574	31.156	115.541
4.	PT. BPR Artha Mertoyudan	Kab. Magelang	17.936	18.865	19.877	20.883	77.561
5.	PT BPR Arfak Indonesia	Kab. Manokwari	5.076	5.450	5.844	6.289	22.659
6.	PT. BPR Delta Artha	Kab. Sidoarjo	106.434	112.013	118.179	125.039	461.665
7.	PT. BPR Gunung Slamet	Kab. Cilacap	83.392	88.358	92.830	95.104	359.684
8.	PT. BPR Citra Dumoga	Kab. B. Mongondow	3.911	4.139	4.414	4.709	17.173
9.	PT. BPR Kartasura Saribumi	Kab. Sukoharjo	20.449	21.612	22.846	24.153	89.060
10.	PT. BPR Sejahtera Batam	Kota Batam	84.644	90.458	95.370	97.460	367.932
11.	PT. BPR Weleri Makmur	Kota Semarang	103.110	109.111	115.485	122.000	449.706
12.	PT BPR D. Simpan Pinjam	Kota Batam	84.644	90.458	95.370	97.460	367.932
13.	PT BPR Sumatera Selatan	Kota Palembang	78.091	82.345	87.088	92.455	339.979
14.	PT. BPR Surya Yudha	Kota Bandung	10.828	11.334	11.916	12.293	46.371
15.	PT. BPR Padma	Kab. Wonosobo	26.779	28.423	30.273	32.115	117.590
16.	PT. BPR Prima Multi Makmur	Kota Pontianak	19.761	20.747	21.801	22.903	85.212
17.	PT. BPR Hidup Arthagraha	Kab. Magelang	17.936	18.865	19.877	20.883	77.561
18.	PT. BPR Prisma Dana	Kota Manado	18.585	19.773	21.195	22.625	82.178
19.	PT BPR Dana Raya	Kota Manado	18.585	19.773	21.195	22.625	82.178
20.	PT. BPR Arta Kedaton Makmur	Kota Bandar Lampung	29.036	30.874	32.859	34.922	127.691

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
21.	PT. BPR Mentari Terang	Kab. Tuban	35.520	37.256	39.082	41.038	152.896
22.	PT. BPR Bina Sejahtera Insani	Kab. Karanganyar	20.262	21.286	22.429	23.666	87.643
23.	PT. BPR Gunung Simpung Artha	Kab. Banyumas	29.368	31.165	33.051	35.147	128.731
24.	PT. BPR Mitratama A.	Kab. Banjar	9.531	9.951	10.418	10.904	40.904
25.	PT. BPR Shinta Daya	Kab. Sleman	26.713	28.098	29.574	31.156	115.541
26.	PT BPR Kintamas Mitra Dana	Kota Batam	84.644	90.458	95.370	97.460	367.932
27.	PT. BPR Terabina Seraya Mulia	Kab. Bengkalis	85.004	82.677	80.657	79.230	327.568
28.	PT. BPR Prima Jambi Mandiri	Kota Jambi	15.080	15.852	16.936	17.728	65.596
29.	PT. BPR Danagung Ramulti	Kab. Sleman	26.713	28.098	29.574	31.156	115.541
30.	PT. BPR Sukawati Pancakanti	Kab. Gianyar	14.269	15.169	16.125	17.011	62.574
31.	PT BPR Karimun Sejahtera	Kab. Karimun	7.207	7.679	8.152	8.594	31.632
32.	PT. BPR Citra Dana Mandiri	Kota Bandar Lampung	29.036	30.874	32.859	34.922	127.691
33.	PT. BPR Kusuma Sumbing	Kab. Temanggung	11.868	12.489	13.111	13.724	51.192

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah 2019

D. Penyaluran Kredit BPR di Indonesia (dalam miliar rupiah)

No. (a)	BPR (b)	2014 (c)	2015 (d)	2016 (e)	2017 (f)
1.	PT. BPR Supra Artapersada	373	383	390	408
2.	PT. BPR Dana Nusantara	403	495	706	881
3.	PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi	378	384	369	384
4.	PT. BPR Artha Mertoyudan	206	189	171	172
5.	PT BPR Arfak Indonesia	222	337	476	531
6.	PT. BPR Delta Artha	354	360	364	392
7.	PT. BPR Gunung Slamet	371	419	487	505
8.	PT. BPR Citra Dumoga	240	238	256	262
9.	PT. BPR Kartasura Saribumi	268	272	311	318
10.	PT. BPR Sejahtera Batam	270	359	417	437

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
11.	PT. BPR Weleri Makmur	227	228	240	296
12.	PT BPR Danamas Simpan Pinjam	105	113	156	214
13.	PT BPR Sumatera Selatan	257	214	197	150
14.	PT. BPR Surya Yudha	208	246	351	456
15.	PT. BPR Padma	254	296	299	333
16.	PT. BPR Prima Multi Makmur	89	104	97	105
17.	PT. BPR Hidup Arthagraha	202	167	151	147
18.	PT. BPR Prisma Dana	158	152	138	152
19.	PT BPR Dana Raya	105	112	121	133
20.	PT. BPR Arta Kedaton Makmur	161	198	212	252
21.	PT. BPR Mentari Terang	181	221	264	297
22.	PT. BPR Bina Sejahtera Insani	151	178	204	227
23.	PT. BPR Gunung Sipping Artha	157	171	193	215
24.	PT. BPR Mitratama Arthabuana	144	115	85	77
25.	PT. BPR Shinta Daya	174	192	212	229
26.	PT BPR Kintamas Mitra Dana	135	128	119	107
27.	PT. BPR Terabina Seraya Mulia	100	120	142	144
28.	PT. BPR Prima Jambi Mandiri	90	67	52	49
29.	PT. BPR Danagung Ramulti	123	143	161	175
30.	PT. BPR Sukawati Pancakanti	161	207	255	284
31.	PT BPR Karimun Sejahtera	128	151	155	137
32.	PT. BPR Citra Dana Mandiri	89	80	101	110
33.	PT. BPR Kusuma Sumbing	100	128	149	147

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah 2019

Lampiran 2. Regresi Linier Berganda**Descriptive Statistics**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Y	49	881	340.35	142.636	48
X ₁	2.79	8.36	5.0354	1.70173	48
X ₂	5.20	7.24	6.5352	.60880	48
X ₃	3911	125039	59381.90	41815.813	48

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.639 ^a	.409	.368	113.377	1.649

a. Predictors: (Constant), X₃, X₁, X₂

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	390623.130	3	130207.710	10.129	.000 ^a
	Residual	565595.849	44	12854.451		
	Total	956218.979	47			

a. Predictors: (Constant), X₁, X₁, X₂

b. Dependent Variable: Y

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	741.949	201.199		3.688	.001		
	X ₁	-11.790	11.991	-.141	-.990	.328	.666	1.502
	X ₂	-163.550	33.324	-.698	-4.908	.000	.665	1.505
	X ₃	.001	.000	.360	2.929	.005	.892	1.121

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 3. Tabel Durbin Watson

T	K	dL	dU
48	2	1.49275	1.57762
48	3	1.45004	1.62308
48	4	1.40640	1.67076
48	5	1.36192	1.72061
48	6	1.31672	1.77253
48	7	1.27087	1.82645
48	8	1.22447	1.88226
48	9	1.17764	1.93987
48	10	1.13046	1.99915

Sumber: Anwar Hidayat, data diolah 2019.

Lampiran 4. t-tabel

Pro	0.25 –	0.10 –	0.05 –	0.025 –	0.01 –	0.005 –	0.001 –
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041

Sumber: Junaidi 2010, data diolah.

Lampiran 5. F-tabel

	df(n ₁)									
df(n ₂)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96

Sumber: Junaidi 2010, data diolah.

Lampiran 6. Data BPR dengan Total Asset Terbesar

No. (a)	BPR (b)	Total Asset (c)
1	PT. BPR Eka Bumi Artha	4,437,148,857.00
2	PT. BPR Karyajatnika Sadaya	3,420,433,103.00
3	PT. BPR Sri Artha Lestari	2,035,079,723.00
4	PT. BPR Jawa Timur	1,586,868,388.00
5	PT. BPR Palu Lokadana Utama	1,202,798,680.00
6	PT BPR Utomo Manunggal Sejahtera	972,079,067.00
7	PT. BPR Surya Y.kencana	887,412,264.00
8	PT. BPR Hasa Mitra	854,632,784.00
9	PT. BPR Modern Express	846,911,848.00
10	PT. BPR Irian Sentosa	522,126,739.00
11	PT. BPR Dana Nusantara	506,250,058.00
12	PD. BPR BAPAS 69	460,733,215.00
13	PD BPR BKK Purwokerto	451,272,286.00
14	PT. BPR Indra Candra MAI BP Indra	449,184,828.00
15	PD. BPR Bank Sleman	440,863,002.00
16	PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi	426,298,977.00
17	PD BPR Subang	405,668,050.00
18	PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama	401,645,671.00
19	PD. BPR BKK Purwodadi	398,768,925.00
20	PT. BPR Supra Artapersada	396,245,064.00
21	PT. BPR Mandiri Artha Abadi	395,110,073.00
22	PD. BPR BKK Karangmalang	381,334,054.00
23	PT. BPR Delta Artha	361,943,532.00
24	PT. BPR Gunung Slamet	360,127,881.00
25	PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta	343,025,394.00
26	PT. BPR Prima Multi Makmur	340,512,560.00
27	PD BPR BP Kota Bandar Lampung	333,233,941.00
28	PD. BPR BKK Lasem	331,804,267.00
29	PT. BPR Citra Dumoga	326,888,789.00
30	PD. BPR BKK Purbalingga	317,456,960.00
31	PT. BPR Kartasura Saribumi	307,956,856.00
32	PT. BPR Artha Mertoyudan	304,605,409.00
33	PT. BPR Intidana Sukses Makmur	282,293,270.00
34	PD. BPR Bank Bantul	272,102,231.00
35	PD. BPR BKK Kebumen	266,847,902.00
36	PD. BPR BP Kulon Progo	262,462,607.00
37	PT. BPR Sejahtera Batam	261,672,794.00
38	PT. BPR Weleri Makmur	256,199,079.00
39	PT BPR Bareleng Mandiri	250,269,376.00
40	PT. BPR Cahaya Fajar	245,956,391.00
41	PT. BPR Sarana Utama Multidana	239,091,764.00
42	PD. BPR BKK Kabupaten Pekalongan	238,674,707.00
43	PT BPR Sumatera Selatan	235,292,382.00
44	PT. BPR Daya Lumbang Asia	225,116,330.00
45	PT. BPR Kita Centradana	223,740,517.00
46	PT. BPR Trisurya Bumindo	222,842,463.00
47	PD. BPR BKK Mandiraja	222,654,025.00
48	PT. BPR Surya Yudha	220,358,208.00
49	PT. BPR Padma	218,667,480.00

(a)	(b)	(c)
50	PD. BPR Serang	217,926,429.00
51	PT BPR Artha Mitra Kencana	216,752,331.00
52	PD. BPR BKK Wonogiri	216,127,814.00
53	PD. BP Kabupaten Dati II Lamongan	214,771,484.00
54	PD. BPR BP Kab. Temanggung	213,456,278.00
55	PT. BPR Hidup Arthagraha	213,212,623.00
56	PD BPR Bintan	209,308,473.00
57	PT BPR Arfak Indonesia	207,031,771.00
58	PD. BPR Bank Daerah Karanganyar	206,194,255.00
59	PT. BPR Citradana Rahayu	205,805,800.00
60	PD. BPR Sarimadu	199,671,453.00
61	PT. BPR Prisma Dana	194,155,937.00
62	PD BPR Kab. Bandung	193,309,743.00
63	PT BPR Dana Raya	193,163,778.00
64	PT. BPR Arta Kedaton Makmur	191,981,883.00
65	PD BPR Karya Remaja	191,192,407.00
66	PD BPR BKK Cilacap	188,504,214.00
67	PT. BPR Kertamulia	187,594,397.00
68	PT. BPR Mentari Terang	181,369,044.00
69	PT. BPR Shinta Daya	179,401,190.00
70	PT. BPR Bina Sejahtera Insani	175,066,886.00
71	PT. BPR Restu Artha Makmur	174,593,282.00
72	PT. BPR Gunung Simpang Artha	172,441,123.00
73	PT. BPR Mitratama Arthabuana	171,948,575.00
74	PD. BPR BKK Kendal	169,272,834.00
75	PT. BPR Citra Dana Mandiri	169,213,565.00
76	PD. BPR BKK Bora	167,078,559.00
77	PD. BPR Bank Jepara Artha	166,866,987.00
78	PT BPR Gamon	163,048,698.00
79	PD. BPR Sukabumi	161,552,692.00
80	PT BPR Kintamas Mitra Dana	161,516,314.00
81	PD. BPR LPK Jalan Cagak	160,477,434.00
82	PD. BPR BKK Ungaran	159,003,343.00
83	PT. BPR Terabina Seraya Mulia	158,400,422.00
84	PD BPR Bank Daerah Pati	155,386,102.00
85	PT. BPR Prima Jambi Mandiri	153,020,257.00
86	PT. BPR Danagung Ramulti	152,161,532.00
87	PD BPR Garut	151,828,587.00
88	PT. BPR Sukawati Pancakanti	151,708,930.00
89	PT. BPR Rudo Indobank	151,161,479.00
90	PT. BPR Rejeki Insani	149,008,164.00
91	PT BPR Karimun Sejahtera	145,409,040.00
92	PT. BPR Banksar Dana Loka	144,893,947.00
93	PD BPR Bank Klaten	143,047,062.00
94	PT. BPR Kusuma Sumbing	142,844,450.00
95	PT. BPR Legian	142,656,856.00
96	PT. BPR Nguter Surakarta	142,115,950.00
97	PD BPR Artha Sukapura	141,405,670.00
98	PT BPR Mega Mas Lestari	140,119,822.00
99	PT BPR Danamas Simpan Pinjam	140,005,959.00
100	PD BPR BKK Boyolali	139,218,388.00

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah 2019